

ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN UMR DI INDONESIA

TAHUN 2006-2015

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Wulandari Putri Purhadiyanto

Nomor Mahasiswa : 14313372

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN UMR DI INDONESIA

TAHUN 2006-2015

SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Sastra 1

Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Wulandari Putri Purhadiyanto

Nomor Mahasiswa : 14313372

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,

Penulis



Wulandari Putri Purhadiyanto

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Faktor Penentu Kebijakan Umr Di Indonesia

Tahun 2006-2015

Nama : Wulandari Putri Purhadiyanto

Nomor Mahasiswa : 14313372

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta,

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaka Sriyana', written over a circular stamp or mark.

Jaka Sriyana, M.Si., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN UMR DI INDONESIA TAHUN 2006-2015

Disusun Oleh : **WULANDARI PUTRI PURHADIYANTO**

Nomor Mahasiswa : **14313372**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 13 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.



Penguji : Aminuddin Anwar, SE., M.Sc.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

"There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again, and again before we reach the mountain top of our desires" - Nelson Mandela

"You must expect great things of yourself before you can do them" - Michel Jordan

"Apapun masalah dan tujuan hidup kita, ketika kita percaya, niat, dan berkemauan tinggi kita pasti bisa melalui dan meraih apa yang kita inginkan" - Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas rahmat, kenikmatan dan kelancaran serta kemudahan yang telah diberikan Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Djoko Purnomo dan Ibu Suparmiyatun, yang tiada hentinya selama ini memberikan nasihat, motivasi, dukungan, semangat, doa dan jasa yang tidak terhingga serta kasih sayang kepada seorang anak tak akan pernah tergantikan. Semoga kesuksesan ini memberikan kebahagiaan dan kebanggaan untuk bapak dan mama serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
2. Kedua kakak laki-laki dan perempuan saya Rizky Purhadiyanto dan Fajar Zuhroni Purhadiyanto, Alinda Pramuningtyas, serta adik laki-laki saya tersayang Naafiansyah Rachmat Purhadiyanto, terimakasih selalu berkenan mendengarkan keluh kesah dan suka duka saya selama ini, sampai saya bisa menulis ini sekarang berkat doa, semangat, dan celotehan kalian.
3. Kedua teman saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya di umur 20 tahun ini dan sampai seterusnya, Lulita Sari dan Dini Andriyane.
4. Untuk orang yang telah menjadi teman dan kakak tingkat terdekat saya sedari 2 tahun lalu, yang telah mengajarkan saya segala sesuatu hal yang baru bagi saya, dan yang selalu membangun sekaligus meruntuhkan *mood* dan semangat saya. Terimakasih, Andi Afrizal.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia ilmu, kesehatan dan rahmat serta hidayahnya sehingga menjadi skripsi dengan judul **“Analisis Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia Tahun 2006-2015”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dan merubah jaman jahiliyah ke jaman yang terang benderang hingga saat ini serta telah membawa petunjuk kebenaran bagi semua umat manusia.

Penulis meyakini bahwa terselesaikannya skripsi ini dengan baik berkat adanya dukungan, bimbingan, motivasi dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan dan memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Staf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang belum pernah penulis ketahui dengan senang hati.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang serta perhatian yang luar biasa terhadap saya dan saudara-saudara saya, saya tidak hanya mengucapkan terimakasih tetapi juga mendoakan agar dapat melihat anaknya untuk meraih kesuksesan.
5. Teman-teman seperjuangan dari semester awal menjadi mahasiswi, khususnya Dita Sekar Ayu dan Diajeng Prima terimakasih telah menjadi teman pertama ku di bangku perkuliahan ini. Teman-teman kelas bridging F semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah mewarnai masa-masa semester awal kuliah berwarna dan penuh pengalaman baru. Serta seluruh teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014.
6. Teman-teman geng Geng Bidariku, Lulita sari, Nia Safitri, Nindy Gusti Mahardika, Melissa Arum, dan Fitria Ayu. Terimakasih banyak kalian sudah menerima dengan ikhlas diriku untuk menjadi teman kalian dan menjadi bagian dari seluruh kehidupan saya selama 3,5 tahun ini dan akan menjadi selamanya nanti, aamiin. Tidak ada yang bisa ku lakukan, selain mengatakan terimakasih banyak teman-teman.
7. Teman-teman Kartika Willis ku, Riska Ramadhani, Juwita Merrysa Santia, dan Dini Andriyane. Terimakasih atas segala waktunya kalian selama 1,5 ini setelah saya kembali ke kos ini yang telah kita habiskan bersama dalam hal apapun. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Dini, yang telah merelakan

laptopnya di kamar 24 untuk saya pakai sampai saya bisa mencapai kelulusan ini.

8. Teman-teman KKN Unit KL-397, Tata, Dhea, Yumna, Fitri, Agung, Ibnu, dan Alan, yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya selama satu bulan hidup bersama.
9. Teman-teman seperjuangan Ujian Kompre Januari, terimakasih telah membantu saya dan menyemangati saya selalu.
10. Teman dekat saya Andi Afrizal, yang telah membantu saya dalam membangun dan meruntuhkan semangat saya dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman satu bimbingan saya, Rizaldi, serta teman saya Asprila Dedy dan Siti Hidayati. Terimakasih banyak karena selalu membantu saya membuat skripsi ini, dari awal sampai akhir.
12. Serta semua pihak-pihak yang telah membantu saya dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis bermaksud untuk berterimakasih atas kerjasamanya.

Sebuah kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT semata begitu pula dengan skripsi ini. Dengan hal tersebut penulis dengan senang hati mengharapkan komentar atau kritik serta saran agar dapat menjadikan penulis yang lebih baik dan bagi pembaca

pada umumnya. Semoga skripsi yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, Februari 2018

Wulandari Putri Purhadiyanto

NIM : 14313372

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN AKHIR/SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAKSI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pengertian Upah.....	13

2.2.2	Pengertian Upah Menurut Teori Efisiensi Upah.....	14
2.2.3	Pengertian Upah Minimum.....	17
2.2.4	Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	18
2.2.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	19
2.2.6	Inflasi.....	22
2.2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	23
2.3	Hubungan Faktor Yang Digunakan Dengan UMR	24
2.3.1	Hubungan Kebutuhan Hidup Layak terhadap UMR.....	24
2.3.2	Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap UMR.....	25
2.3.3	Hubungan Inflasi terhadap UMR	25
2.3.4	Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap UMR	26
2.4	Hipotesis	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1	Jenis Data dan Pengumpulan Data	28
3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian	28
3.2.1	Variabel Dependen (Y)	28
3.2.2	Variabel Independen (X).....	29
3.3	Metode Analisa Data.....	30
3.3.1	Model Common Effect.....	31
3.3.2	Model Fixed Effect	32
3.3.3	Model Random Effect	33
3.3.4	Analisis Data	34
3.4	Objek Penelitian	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Data Penelitian	39
4.2 Deskripsi Objek Data Penelitian	39
4.2.1 Upah Minimum	39
4.2.2 Kebutuhan Hidup Layak	40
4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto	41
4.2.4 Inflasi.....	42
4.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	43
4.3 Persamaan Regresi	44
4.4 Hasil Estimasi Regresi.....	45
4.4.1 Estimasi Common Effect Model.....	45
4.4.2 Estimasi fixed Effect Model.....	46
4.4.3 Estimasi Random Effect Model	47
4.5 Pemilihan Model	47
4.5.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)	48
4.5.2 Hausman Test.....	49
4.6 Model Terbaik	50
4.6.1 Model Fixed Effect	50
4.7 Analisis Hasil Regresi	53
4.7.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	53
4.7.2 Uji Signifikansi Bersama (Uji F)	54
4.7.3 Uji T-statistik	54
4.8 Pembahasan	56

4.8.1	Analisis Pengaruh Jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia.....	56
4.8.2	Analisis Pengaruh Jumlah Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia.....	56
4.8.3	Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia	57
4.8.4	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Implikasi	60
Daftar Pustaka		62
LAMPIRAN		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.....	4
Tabel 4. 1 Estimasi Hasil Output Regresi Common Effect Model.....	45
Tabel 4. 2 Estimasi Hasil Output Regresi fixed Effect Model.....	46
Tabel 4. 3 Estimasi Hasil Output Regresi Random Effect Model	47
Tabel 4. 4 Hasil dari Likelihood Ratio Test (Chow Test).....	48
Tabel 4. 5 Hasil dari Hausman Test	49
Tabel 4. 6 Hasil Regresi Model Fixed Effect.....	50
Tabel 4. 7 Konstanta Antar Daerah.....	51
Tabel 4. 8 Konstanta Tahunan (Fixed Effect Period)	52
Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Hipotesis	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Prosedur Pengujian Pemilihan Model	35
Gambar 4. 1	Grafik Perkembangan Jumlah Belanja Kebutuhan Hidup Layak Provinsi di Indonesia.....	40
Gambar 4. 2	Grafik Perkembangan Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia (juta rupiah).....	41
Gambar 4. 3	Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia	42
Gambar 4. 4	Grafik Perkembangan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tiap Provinsi di Indonesia	43
Gambar 4. 5	Grafik Konstanta Fixed Effect Period dalam Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia tahun 2006-2015	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Estimasi Output Hasil Regresi Common Effect Model.....	64
Lampiran 2 Estimasi Output Hasil Regresi Fixed Effect Model	65
Lampiran 3 Estimasi Output Hasil Regresi Random Effect Model.....	67
Lampiran 4 Hasil Uji Chow	69
Lampiran 5 Hasil Uji Hausman.....	70
Lampiran 6 Hasil Regresi Terpilih Fixed Effect Model	71
Lampiran 7 Jumlah Belanja Kebutuhan Hidup Layak Provinsi di Indonesia.....	73
Lampiran 8 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia (juta rupiah)	75
Lampiran 9 Tingkat Inflasi Tiap Provinsi di Indonesia	77
Lampiran 10 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tiap Provinsi di Indonesia	78

ABSTRAKSI

Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar minimum upah yang harus diterima oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dalam waktu satu bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh pada penentuan kebijakan upah minimum pada tahun periode 2006-2015. Faktor-faktor yang dianalisis adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan periode tahun 2006-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan data runtut waktu *timeseries* dari tahun 2006 sampai 2015, dan *cross section* sebanyak 33 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil regresi terbaik pada penelitian ini adalah menggunakan metode regresi *Fixed Effect Model* yang diketahui variabel KHL, PDRB, dan IPM signifikan secara positif, sedangkan inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap UMR di Provinsi Indonesia.

Kata kunci: UMR, UMP, Upah Minimum, Upah Minimu Regional, Upah Minimum Provinsi, KHL, PDRB, Inflasi, dan IPM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sudah tidak samar lagi bagi pemerintah maupun para pekerja dan perusahaan itu sendiri. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan penduduk yang termasuk dalam usia siap kerja. Didalam hubungan tenagakerjaan ini ada unsur-unsur yang ada antarlain, perintah, pengupahan dan waktu. Diantara para pekerja dan para perusahaan mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan hubungan mereka dalam kepentingan untuk pemenuhan kelangsungan hidup, kemajuan perusahaan, dan kesejahteraan bersama.

Meskipun tujuan mereka sama, namun di sini juga terdapat perbedaan-perbedaan dalam pencapaian tujuan mereka masing-masing. Salah satunya adalah permasalahan akan upah yang diberikan perusahaan dan yang diterima oleh para pekerja. Bagi pihak pemberi upah, tentunya mereka ingin memberikan upah seminimal mungkin kepada para pekerja. Lain hal bagi para pekerja, mereka mengharapkan upah setinggi dan sebaik mungkin agar terdapat perbaikan pada tingkat kesejahteraan hidupnya dapat ditingkatkan lagi (Feriyanto, 1997).

Dimana pengertian upah itu sendiri adalah imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang, melalui perjanjian kerja yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri sendiri dan keluarganya. Dalam pengertian teori adalah pembayaran yang diperoleh dalam tenaga kerja atas apa yang telah mereka berikan kepada perusahaan (Sukirno, 2014).

Pada kondisi seperti ini membuat pemerintah mempunyai peran yang sangat diperlukan sebagai penengah antara pekerja dan perusahaan. Pihak pemerintah di sini ditujukan untuk membuat penyalarsan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pembuatan peraturan dan sistem hubungan antara proses dan biaya produksi dan upah yang akan diberikan secara jelas. Sesuai dalam PP No.8/1981 Tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari para pengusaha kepada para pekerja untuk pekerjaan yang telah dilakukan, yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk jumlah uang yang telah dipersetujui ketetapanannya.

Dalam upaya penghindaran masalah perbedaan pendapat tersebut pemerintah membuat kebijakan upah minimum yang tujuannya untuk menjaga hak para pekerja untuk tidak diberikan semaunya dari para pengusaha. Sesuai dengan aturan PP No.8/1981 bahwa upah minimum dibuat secara minimum perprovinsi, sektoral regional, maupun subsektoral sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan perwilayahnya.

Dari perbedaan penetapan tingkat upah minimum, kebijakan ini menetapkannya sesuai dengan standar biaya untuk kebutuhan hidup yang ada di tiap provinsinya. Pemerintah mendasarkan penetapan upah minimum ini pada Kebutuhan Hidup Layak

dengan memperhatikan juga produktivitas dan pertumbuhan ekonominya. Serta upah minimum ini diperhitungkan menggunakan formula upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum berjalan dengan jumlah tingkat inflasi national tahunan dan tingkat pertumbuhan PDB (Thamrin, 2017).

Dari sini terlihat bahwa adanya pengaruh inflasi pada penentuan tingkat upah minimum ini. Berarti ketika terjadi inflasi maka terjadi pula kenaikan harga yang ditunjukkan pada jumlah KHL yang ada. Ini membuat permasalahan baru dalam pemenuhan upah secara layak. Karena biasanya upah yang terjadi masih dirasa kurang dari terjadinya inflasi yang ada.

Keadaan ketenagakerjaan Indonesia saat ini sudah sangat lebih maju. Di bawah. Dapat diketahui bahwa ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun 2006-2015 mengalami perkembangan menjadi lebih baik dan begitu juga dengan Tingkat Partisi Pasi Angkatan Kerja (TPAK) selalu mengalami peningkatan. Juga terlihat dari data pengangguran dari tahun 2006 ke 2014 mengalami penurunan. Dari keadaan ini bisa didapatkan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan jumlah upah yang diterima. Berikut ini ditampilkan tabel 1.1 (halaman selanjutnya) yang menunjukkan perkembangan ketenagakerjaan dari tahun 2006-2015

Tabel 1.1 Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia

no	jenis kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010
1	Penduduk Usia 15th Keatas	160811498	164118323	166641050	169328208	172070
2	Angkatan Kerja	106388935	109941359	111947265	113833280	116527546
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja %	66,16	66,99	67,18	67,23	67,72
	b. Bekerja	95456935	99930217	102552750	104870663	108207767
	c. Pengangguran Terbuka	10932000	10011142	9394515	8962617	8319779
	d. Tingkat Pengangguran Terbuka %	10,28	9,11	8,39	7,87	7,14

Sumber data: Badan Pusat Statistik Indonesia 2017

Lanjutan tabel 1.1

no	jenis kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk Usia 15th Keatas	17385717	17687832	179967361	182992204	186100917
2	Angkatan Kerja	116097701	119849734	120172003	121872931	122380021
	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja %	66,78	67,76	66,77	66,6	66,76
	b. Bekerja	107416309	112761072	112761072	114628026	114819199
	c. Pengangguran Terbuka	8681392	7344866	7410931	7244905	7560822
	d. Tingkat Pengangguran Terbuka %	7,48	6,13	6,17	5,94	6,18

Sumber data: Badan Pusat Statistik Indonesia 2017

Menurut teori upah yang sesuai dengan seharusnya, upah akan membuat produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah output yang dihasilkan juga akan meningkat. Jumlah output tersebut bisa dikatakan dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Output ini dapat digunakan untuk penetapan tingkat upah minimum karena tingkat output yang dihasilkan akan berpengaruh pada keuntungan dan laba yang akan didapatkan (Feriyanto, 1997).

Peningkatan tingkat produktivitas output tersebut bisa didapatkan oleh para tenaga kerja yang lebih berkualitas akan keterampilan dan kemampuannya. Di sini terlihat adanya perubahan dalam pembangunan dan perbaikan akan kualitas dari sumber daya manusianya. Perubahan tersebut dapat dihitung dan ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ukuran yang paling sering digunakan dari status komperatif pembangunan social ekonomi ini bias dilihat dari Program Pembangunan PBB (UNDP- *The United Nations Development Program*). Dalam laporan ini memberikan informasi pembangunan dan perbaikan yang informative dalam bentuk IPM tersebut (Susanto, 2015)

Permasalahan upah ini adalah masalah yang lumayan rumit untuk penyelesaiannya terutama dalam bidang industri. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya mengenai pemahaman upah yang berbeda dari sisi pemberi upah dan penerima upah. Peraturan mengenai hal ini seharusnya bisa dipertimbangkan dari segala perspektif pemahaman yang ada, seperti dalam pemenuhan hak para pekerja dan juga pemenuhan untuk kelangsungan jalan perusahaan. Maka dari itu diharapkan dan diperlukan adanya skala upah pekerja bagi perusahaan, serta persetujuan dalam pelaksanaan kebijakan upah minimum ini dengan matang dan mempertimbangkan semua aspek. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dan perusahaan yang memberi upah dengan seimbang.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah dalam bentuk:

- 1) Bagaimana pengaruh jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015?
- 2) Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015?
- 3) Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015?
- 4) Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor tersebut dapat mempengaruhi penetapan kebijakan upah minimum provinsi di Indonesia dan menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruhnya pada penetapan kebijakan upah minimum tersebut.

- 1) Menganalisis pengaruh jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015
- 2) Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015
- 3) Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015

- 4) Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penetapan Kebijakan Upah Minimum Regional di tahun 2006-2015

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa jurnal atau artikel yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan perencanaan peningkatan kesejahteraan pekerja, sumber informasi mengenai nilai upah minimum regional untuk para pekerja di Indonesia, dan sarana informasi untuk para pembaca yang awam mengenai informasi pembentukan kebijakan perencanaan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah minimum regional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Latar belakang

Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan tinjauan terhadap penelitian yang dilakukan terdahulu dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi jenis dan sumber pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data

Bab ini menguraikan deskripsi upah minimum kerja di Indonesia, analisis dan interpretasi ekonomi

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Charysa (2013) di Pulau Jawa Tengah dengan periode tahun 2008-2011 mendapatkan tingkatan nominal upah yang berbeda-beda dari setiap daerah. Jurnal ini menganalisis bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Random Effect Model* (REM), dengan jenis data gabungan dari *time series* periode tahun 2008-2011 dengan *cross section* 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari kesimpulan ini adalah pertumbuhan dan inflasi secara parsial berpengaruh pada tingkat upah minimum regional. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif, sedangkan inflasi berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Jawa Tengah

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Nurtiyas (2016) di Pulau Jawa dengan periode tahun 2010-2014 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Random Effect Model* (REM), dengan jenis data gabungan dari *time series*

periode tahun 2010-2014 dengan *cross section* provinsi di Pulau Jawa. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa .Hasil dari kesimpulan ini adalah PDRB dan TPAK berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Pulau Jawa, pendapatan perkapita berengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Pulau Jawa.Sedangkan IHK tidak berpengaruh pada upah minimum regional di Pulau Jawa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Desmiwati (2013) di Provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2001-2008 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemampuan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Fixed Effect Model*, dengan jenis data gabungan dari *time series* periode tahun 2001-2008 dengan *cross section* 28 provinsi di Indonesia. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia.Hasil dari kesimpulan ini adalah PDRB, KHM dan IHK signifikan berpengaruh pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia.

Dalam penelitian Merdekawati (2016) jurnal yang dilakukan di Pulau Jawa dengan periode tahun 2014 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi spasial linier berganda, dengan jenis data spasial area sebagai pendekatannya dengan *cross section* seluruh kabupaten/kota di

Jawa Tengah. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari kesimpulan ini adalah PDRB dan IHK signifikan berpengaruh secara negatif, sedangkan KHL signifikan berpengaruh secara positif pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia.

Dalam penelitian pada jurnal Nindya (2012) yang dilakukan di Yogyakarta dengan periode tahun 1993-2010 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan SMP, tingkat pendidikan SMA, dan tingkat pendidikan Sarjana terhadap upah minimum regional di Yogyakarta. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data *time series Mackinno, White, and Davidson* (MWD) dengan jenis data *time series* dari tahun 1993 sampai 2010 di Yogyakarta. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta. Hasil dari kesimpulan ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan SMA, dan tingkat pendidikan Sarjana signifikan berpengaruh secara positif, sedangkan pengangguran signifikan berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Yogyakarta. Namun untuk tingkat pendidikan SMP tidak signifikan berpengaruh pada upah minimum regional di Yogyakarta.

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Susanto (2015) di Pulau Jawa dengan periode tahun 2009-2012 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Fixed Effect Model*, dengan jenis data gabungan dari *time series*

periode tahun 2009-2012 dengan *cross section* 5 provinsi di Pulau Jawa. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. Hasil dari kesimpulan ini adalah penyerapan tenaga kerja signifikan berpengaruh secara negatif sedangkan IPM signifikan berpengaruh secara positif pada upah minimum regional di Pulau Jawa.

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Yanty (2017) di Provinsi Indonesia dengan periode tahun 2015 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia dan Kemampuan Hidup Minimum (KHL) terhadap upah minimum regional provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi linier berganda, dengan jenis data gabungan dari *time series* tingkat upah minimum regional perbulan, tingkat IPM, dan KHM pada tahun 2015. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil dari kesimpulan ini adalah IPM dan KHM berpengaruh secara positif pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia.

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan oleh Ilham (2013) di Jember dengan periode tahun 1990-2011 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi terhadap upah minimum regional provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi *Ordinary Least Square* (OLS). Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil dari kesimpulan ini adalah Kebutuhan Hidup Minimum (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara positif pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia. Sedangkan untuk Inflasi

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum regional di Provinsi Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada data *cross section* dan *time series* serta variable independennya. Pada penelitian ini penulis menggunakan data *crosssection* 33 Provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2006-2015. Penulis menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variable independennya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Upah

Upah merupakan imbalan jasa atau hak yang diterima pekerja dalam bentuk uang atau barang dengan perjanjian kerja yang telah disepakati yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan bagi diri pekerja itu sendiri, dan keluarganya. Dalam teori perekonomian tingkat upah pekerja akan mempengaruhi tingkat biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Sukirno, 2014).

Ada beberapa asumsi jika terjadi kenaikan upah:

- 1) Kenaikan tingkat upah akan membuat biaya produksi perusahaan meningkat, yang selanjutnya akan menaikkan harga output perunitnya. Konsumen akan memberikan respon negatif apabila terjadi kenaikan harga barang dengan mengurangi jumlah barang yang akan dikonsumsinya atau menggantinya dengan

barang lain yang sejenis. Akibatnya jika harga naik membuat perkiraan barang yang terjual menurun, dan akhirnya produsen mengurangi jumlah produksinya. Ini akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan karena terjadi penurunan skala produksi, atau disebut juga efek skala produksi.

- 2) Apabila upah naik (dengan asumsi harga dari barang modal lain tidak berubah) pengusaha akan beralih pada penggunaan teknologi padat modal untuk menyelesaikan proses produksinya menggantikan fungsi tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut akan tergantikan perannya oleh mesin-mesin berteknologi. Penurunan ini bisa disebut juga efek dari substitusi tenaga kerja yang diganti oleh teknologi mesin.

2.2.2 Pengertian Upah Menurut Teori Efisiensi Upah

Perusahaan akan bekerja lebih efisien jika keadaan upah berada di atas garis ekuilibrium. Keadaan ini akan lebih menguntungkan perusahaan jika mereka tetap mempertahankan upah tinggi meskipun penawaran terhadap tenaga kerja sedang menaik. Menurut teori ini, seharusnya memberikan upah yang tinggi akan menguntungkan. Karena hal ini akan meningkatkan efisiensi pekerja dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif lagi. Teori ini juga telah menduga ketika pekerja mendapatkan upah yang tinggi mereka akan mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan keadaan yang demikian akan membuat para pekerja berada pada *mood* yang sangat baik ketika melakukan pekerjaannya dan dilakukan secara optimal. Dampak yang akan dirasakan oleh pihak

perusahaan secara tidak langsung adalah akan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang akan memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi yang ujungnya akan meningkatkan upah yang akan didapatkan lagi oleh para pekerja. Dengan hasil ini para pekerja akan semakin giat untuk bekerja dengan optimal dan kinerja yang baik tidak akan membuat perusahaan merasa merugi. Karena si perusahaan tersebut telah memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja yang terampil dan bisa menghasilkan output maksimal (Mc Cafferty, Stephen, 1990).

Terdapat beberapa jenis teori mengenai upah efisiensi yang menjelaskan hal mengapa perusahaan mau memberikan upah yang lebih tinggi kepada para pekerjanya (Mankiw, 2013) antarlain:

- 1) Kesehatan para pekerja. Keadaan ini berkaitan dengan kemampuan pekerja dalam pemenuhan konsumsi akan kebutuhan nutrisi bagi dirinya. Jika pekerja dapat memperoleh upah yang tinggi maka asumsinya mereka akan mampu mengkonsumsi nutrisi lebih banyak lagi, dengan demikian para pekerja akan memiliki keadaan yang lebih sehat dan produktif dalam melakukan pekerjaannya. Dengan kualitas kesehatan para pekerja yang baik ini akan menguntungkan bagi perusahaan, karena mereka akan lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya dan menghasilkan output yang optimal.
- 2) Perputaran tenaga kerja. Bagian ini menjelaskan mengenai hubungan antara upah dengan perputaran kerja yang terjadi. Para pekerja akan memilih berhenti dari pekerjaannya ketika mempunyai alasan untuk meningkatkan kualitas jenjang

karier, perpindahan tempat tinggal, dan untuk jabatan yang lebih baik lagi. Perputaran ini terjadi karena para pekerja sangat bergantung dari apa yang mereka peroleh selama mereka bekerja di sebuah perusahaan, baik itu keuntungan yang diperoleh ataupun kerugian yang harus dikorbankan mereka. Semakin tinggi upah yang mereka dapat akan semakin betah mereka pada perusahaan tersebut dan tidak akan melakukan perpindahan seperti penjelasan di atas. Jika perputaran atau perpindahan kerja terjadi, sebenarnya perusahaan akan lebih mengalami kerugian daripada saat perusahaan harus memberi mereka upah yang tinggi. Karena pihak perusahaan akan lebih banyak mengeluarkan biaya untuk merekrut dan melatih para pekerja baru.

- 3) Keterampilan bekerja. Hal ini membicarakan tentang keterkaitan hubungan antara upah dengan keterampilan pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Pemberian upah yang dilakukan perusahaan bisa dilakukan dari pertimbangan keterampilan kerja dari para pekerjanya dengan melihat dan memperhatikan sendiri bagaimana kinerja mereka saat mereka bekerja. Namun tingkat standar minimum bagi si tenaga kerja ini sudah ditetapkan, dan perusahaan harus bisa memberikan upah mereka di atas nilai rata-rata standar tersebut. Jika perusahaan bisa memberikan upahnya sesuai dengan yang telah dilakukan oleh para pekerjanya bahkan lebih besar dari ekspektasi dari para pekerja akan membuat mereka akan memilih untuk bertahan pada perusahaan tersebut.
- 4) Produktivitas pekerja. Perusahaan tidak bisa secara langsung mengawasi sendiri semua pekerjanya dengan selektif dan jeli tentang keadaan produktif atau

tidaknya mereka ketika melakukan pekerjaan. Perusahaan akan memilih memberikan upah yang tinggi kepada mereka yang sadar diri akan pentingnya semangat dan produktivitasnya dalam bekerja. Dengan pemberian upah yang tinggi ini akan membuat mereka termotivasi untuk menjadi lebih produktif lagi kedepannya.

2.2.3 Pengertian Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu nilai standar atau rata-rata minimum yang digunakan pihak perusahaan atau pelaku industri seperti produsen dalam hal pemberian upah kepada para tenaga kerjanya. Tiap provinsi mempunyai standar atau jumlah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi berbeda-beda, oleh karena itu terbentuk lah kebijakan upah minimum provinsi (Nurtiyas, 2016).

Seperti yang telah ditetapkan dalam PP No.8/1981 yang berisi upah minimum dapat ditentukan secara minimum perprovinsi, sektoral regional, maupun subsektoral. Namun saat ini masih hanya sekedar tingkat upah minimum regional pada tiap daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan upah minimum hanya diperuntukkan untuk pekerja dengan masa kerjanya 0 sampai dengan 1 tahun. Definisi tersebut mengandung dua unsure penting upah minimum, yakni:

- 1) Upah permulaan atau awal adalah upah terendah yang harus diperoleh oleh para pekerja pada saat mereka pertama kali diterima sebagai pekerja untuk bekerja di suatu perusahaan.

- 2) Jumlah upah minimum harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup para pekerja baik itu tentang sandang, pangan, dan atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Upah minimum ini diperlukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pekerja secara layak dengan pada tingkat pendapatan “*living wage*”, yang dimana pekerja merasa mendapatkan gaji yang sesuai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upah minimum dapat menjauhi terjadinya eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan nakal, terutama pada pekerja yang memiliki kemampuan rendah (*low skilled*). Penetapan upah minimum ini juga bisa meningkatkan produktivitas dari para tenaga kerja dan mengurangi resiko konsekuensi penangguran seperti dugaan yang ada pada teori ekonomi konvensional.

2.2.4 Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Penetapan upah minimum yang dilakukan setiap satu tahun sekali ini didahului oleh perhitungan jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) melalui survey dari Dinas Tenaga Kerja dengan Dewan Pengupahan. Dalam perhitungan KHL ini juga diperhatikan pula faktor-faktor lain seperti tingkat inflasi, kebutuhan fisik minimum, pertumbuhan ekonomi, dan perbandingan tingkat pengupahan serta kemampuan perusahaan dalam pemberian upah.

Penjelasan mengenai KHL dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 adalah pelaksanaan dan komponen tahap pencapaian kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang masih berstatus

lajang agar dapat hidup dengan layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial, dalam kebutuhan untuk satu bulan. Jumlah KHL dalam penetapan tingkat upah minimum didasarkan dari nilai KHL Kab/Kota terendah pada tiap provinsi dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha yang minimal bisa dilakukan (*marginal*), dan Gubernur juga memperhatikan tentang keadaan pasar tenaga kerja. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012, KHL terdiri dari:

- 1) Makanan dan minuman (11 items)
- 2) Sandang (13 items)
- 3) Peumahan (26 items)
- 4) Pendidikan (2 items)
- 5) Kesehatan (5 items)
- 6) Transportasi (1 item)
- 7) Rekreasi
- 8) Tabungan (2 items)

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pengertian mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijelaskan Gregory adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari produksi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Sisi produksi merubah input faktor produksi tenaga kerja, dan modal menjadi output. Faktor produksi ini jug dilengkapi degan biaya produksi untuk membayar para tenaga kerja dan bunga sewa pada faktor produksi modal (*factor of payment*) (Mankiw, 2013).

Dalam prakteknya data PDRB digunakan tidak saja untuk mengukur besarnya output yang telah dihasilkan, namun juga untuk mengukur kesejahteraan penduduk pada suatu daerah. Menaikannya PDRB akan membuat pendapatan daerah dari sektor pajak, dan retribusinya meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli (PAD) pada daerah tersebut. Faktor lain yang digunakan dalam penentuan tingkat upah minimum oleh pemerintah dan Dewan Pengupahan salah satunya adalah PDRB. Dari peningkatan PDRB terlihat jika produktivitas tenaga kerja pun meningkat, dan akan membuat tingkat upah pekerja seharusnya meningkat pula.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai PDRB, yaitu:

- 1) Pendekatan produksi. Produksi nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari beberapa sektor perekonomian. 9 sektor tersebut antaralain:
 - a) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
 - b) Pertambangan dan penggalian
 - c) Industri
 - d) Listrik, gas, dan air
 - e) Bangunan
 - f) Perdagangan, restoran, dan hotel
 - g) Pengangkutan dan komunikasi
 - h) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
 - i) Jasa lain

- 2) Pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dari berbagai faktor produksi pada proses produksi serta dari berbagai unsur dan jenis pendapatan.

$$Y = U + I + S + \text{Laba}$$

Ket:

Y = Pendapatan nasional (ribuan)

U = Pendapatan yang diterima tenaga kerja (ribuan)

I = Pendapatan bunga untuk investor (ribuan)

S = Pendapatan pemilik faktor produksi modal (tanah) (ribuan)

Laba = Pendapatan yang didapatkan oleh pemilik usaha (ribuan)

- 3) Pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional yang diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari seluruh permintaan akhir atas output yang telah dihasilkan dan diukur pada harga pasar yang berlaku.

$$Y = C + I + G + (X-m)$$

Ket:

Y = PDRB (ribuan)

C = Konsumsi masyarakat (ribuan)

I = Investasi (ribuan)

G = Pengeluaran pemerintah (ribuan)

(X-m) = Ekspor netto (ribuan)

2.2.6 Inflasi

Pengertian inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi pada barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus menerus. Keadaan ini membuat suatu masalah yang akan terus dihadapi oleh seluruh negara. Dalam penyelesaian masalah ini setiap negara ini mempunyai kebijakan yang berbeda dengan meminimalisir tingkat inflasi yang ada. Karena inflasi sendiri itu adalah salah satu faktor yang mengindikasikan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat disuatu negara (Putri, 2016).

Inflasi yang terjadi dalam hal ini adalah salah satu dari penyebab inflasi *cost push inflation*, dimana kenaikan harga ini diakibatkan dari pengkalkulasian pada kenaikan biaya produksi. Perusahaan akan berusaha meminimalisirkan biaya produksi tersebut dengan menaikkan harga outputnya. Lalu membuat terjadinya kenaikan harga barang dipasaran (Charysa, 2013).

Biaya sosial inflasi ada berasal dari keluhan masyarakat terhadap inflasi. Keluhan ini seperti daya beli tenaga kerja, upah riil mereka yang bergantung pada produktivitas marginal tenaga kerjanya, bukan pada seberapa banyak uang yang dicetak pemerintah. Ketika bank sentral melakukan penekanan pada tingkat inflasi dengan berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan akan membuat para pekerja merasa upah riil mereka tidak naik lebih cepat. Padahal ketika ini terjadi, seharusnya perusahaan bisa sedikit menaikkan harga produk mereka dan bisa memberikan upah pekerjanya meningkat walaupun kecil. Teori uang klasik menjelaskan, ketika terjadi perubahan tingkat harga secara keseluruhan adalah perubahan yang terjadi pula pada unit-unit ukuran. Harga apapun dan berapapun yang dibeli akan meningkat 10 kali lipat, tetapi diikuti juga

dengan tabungan dan upahnya. Kesejahteraan ekonomi sebenarnya bergantung pada harga relatif, bukan hanya pada seluruh tingkat harga (Mankiw, 2013).

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disebut IPM ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi nasional, yang didasari dari penggabungan kualitas pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendekatan riil perkapita. *United Nation Development Program* (UNDP) memunculkan suatu indikator perhitungan IPM untuk mengukur kesuksesan dari pembangunan dan kesejahteraan pada wilayah dalam bidang pembangunan kualitas sumber daya manusianya. IPM ini juga bisa menunjukkan dampak kinerja pembangunan wilayah dengan melihat kualitas penduduk sekitar dalam harapan hidup, intelegualitas, dan standar kehidupan layaknya. Dalam perumusan kebijakan dan penentuan program rencana pembangunan, IPM juga memberikan tuntunan atau pilihan untuk menentukan skala prioritas pembangunan tersebut (Susanto, 2015).

IPM ini bisa disusun dari komponen pembangunan manusia yang bisa dilihat dari dasar usia yang diukur pada harapan hidup pada saat lahir bagi ibu dan bayinya. Lalu pengetahuan yang bisa diukur pada tingkat pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah), serta kehidupan layak dengan jumlah PDB yang ada (Badan Pusat Statistik, 2017).

Dalam konsep pembangunan manusia ini, pembangunan seharusnya dapat dipahami dari sudut manusianya sendiri. Bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi yang

terjadi (Wibowo, 2011). Ada sejumlah ukuran penting dalam pembangunan manusia (Human Development Report, 1995):

- 1) Pembangunan harus mengutamakan perhatiannya pada penduduk
- 2) Pembangunan ditujukan untuk memperbesar pilihan untuk penduduk, tidak saja untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus bisa terpusat pada keseluruhan penduduk.
- 3) Pembangunan tidak saja terfokus pada kemampuan manusia, namun juga dalam upaya pemanfaatan kemampuan tersebut dengan optimal.

2.3 Hubungan Faktor Yang Digunakan Dengan UMR

2.3.1 Hubungan Kebutuhan Hidup Layak terhadap UMR

Penetapan upah minimum yang dilakukan setiap satu tahun sekali ini didahului oleh perhitungan jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) melalui survey dari Dinas Tenaga Kerja dengan Dewan Pengupahan. Dalam perhitungan KHL ini juga diperhatikan pula faktor-faktor lain seperti tingkat inflasi, kebutuhan fisik minimum, pertumbuhan ekonomi, dan perbandingan tingkat pengupahan serta kemampuan perusahaan dalam pemberian upah.

Jumlah KHL dalam penetapan tingkat upah minimum didasarkan dari nilai KHL Kab/Kota terendah pada tiap provinsi dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha yang minimal bisa dilakukan (*marginal*), dan Gubernur juga memperhatikan tentang keadaan pasar tenaga kerja. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012.

2.3.2 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap UMR

Pengertian mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dijelaskan Gregory adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari produksi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Sisi produksi merubah input faktor produksi tenaga kerja, dan modal menjadi output. Faktor produksi ini jug dilengkapi dengan biaya produksi untuk membayar para tenaga kerja dan bunga sewa pada faktor produksi modal (*factor of payment*) (Mankiw, 2013).

Menaikannya PDRB akan membuat pendapatan daerah dari sektor pajak, dan retribusinya meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli (PAD) pada daerah tersebut. Faktor lain yang digunakan dalam penentuan tingkat upah minimum oleh pemerintah dan Dewan Pengupahan salah satunya adalah PDRB. Dari peningkatan PDRB terlihat jika produktivitas tenaga kerja pun meningkat, dan akan membuat tingkat upah pekerja seharusnya meningkat pula.

2.3.3 Hubungan Inflasi terhadap UMR

Menurut teori yang dikemukakan Murni (2013) upaya untuk mengendalikan inflasi dapat berupa penerapan pada kebijakan fiskal untuk mengubah dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter untuk mengatur jumlah beredar, dan kebijakan pendapatan yang dimana pemerintah berusaha membuat inflasi moderat melalui langkah-langkah langsung (Murni, 2013).

Dalam menetapkan upah minimum mempertimbangkan beberapa faktor lain yang salah satunya adalah inflasi. Karena inflasi menunjukkan harga-harga pada

kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi secara layak. Sehingga ketika tingkat inflasi tinggi membuat upah dituntut untuk naik pula.

2.3.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap UMR

IPM ini juga bisa menunjukkan dampak kinerja pembangunan wilayah dengan melihat kualitas penduduk sekitar dalam harapan hidup, intelektualitas, dan standar kehidupan layaknya. Dimana ketika terjadi peningkatan tingkat produktivitas output tersebut bisa didapatkan oleh para tenaga kerja yang lebih berkualitas akan keterampilan dan kemampuannya. Di sini terlihat adanya perubahan dalam pembangunan dan perbaikan akan kualitas dari sumber daya manusianya (Susanto, 2015).

Keadaan ini akan mempengaruhi keadaan pasar tenaga kerja mengenai penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, akan membuat harga yang ditawarkan dan diperoleh para tenaga kerja mengikuti kualitas mereka.

2.4 Hipotesis

Dari penjelasan setiap variabel yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan sementara, bahwa:

- 1) Jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia
- 2) Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia

- 3) Tingkat inflasi diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia
- 4) Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia
- 5) Semua variabel independen diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Metode ini adalah data yang mempunyai nilai data satuan/numerik contohnya adalah jumlah benda, harga benda, jumlah uang, dll (Sriyana, Metode Regresi Data Panel, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dengan periode tahun 2006-2015, serta jurnal dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu upah minimum regional (UMR) sebagai (Y). Upah Minimum Regional adalah upah bulanan

terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan UMR pada tahun 2006-2015.

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbul variabel dependen. Variabel independen dalam analisis penetapan upah minimum regional ini, yaitu:

- 1) Variabel X1: Kebutuhan Hidup Layak. KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan perbulan. Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Lebih jauh mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- 2) Variabel X2: Produk Domestik Regional Bruto Perkapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah dalam periode tahun tertentu dan biasanya dalam periode satu tahun. Penghitungan PDRB dalam penelitian ini menggunakan PDBR dengan harga konstan.
- 3) Variabel X3: Inflasi. Menurut penjelasan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang

berlangsung terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

- 4) Variabel X4: Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah suatu proses untuk memperluas pilihan untuk penduduk. Untuk menjamin tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. IPM ini bisa disusun dari komponen pembangunan manusia yang bisa dilihat dari dasar usia yang diukur pada harapan hidup pada saat lahir bagi ibu dan bayinya. Lalu pengetahuan yang bisa diukur pada tingkat pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah), serta kehidupan layak dengan jumlah PDB yang ada.

3.3 Metode Analisi Data

Dalam penelitian ini menggunakan data panel atau disebut regresi model panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data waktu (*time series*). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Metode ini mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Karena itu dengan data panel akan memberikan jumlah data yang semakin banyak sehingga memenuhi prasyarat dan sifat-sifat statistik (Sriyana, 2014). Lalu, menggabungkan informasi dari data *time series* dan

cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variable.

3.3.1 Model Common Effect

Metode *common effects* merupakan yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode yang mempunyai asumsi intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Hal ini dikarenakan dasar yang digunakan dalam regresi data panel ini yang mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya. Model ini persamaan regresinya dalam bentuk linear adalah sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Ket:

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien intersep

X_{1it} = KHL (ribuan)

X_{2it} = PDRB (ribuan)

X_{3it} = Inflasi (%)

X_{4it} = IPM (%)

i = banyaknya individu/unit observasi (provinsi)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2006-2015)

3.3.2 Model Fixed Effect

Pada regresi data panel menggunakan metode *common effects* mengasumsikan bahwa intersep maupun slope sama baik antar waktu maupun individu. Namun asumsi ini memungkinkan membuat hasil regresi yang jauh berbeda dan hasil estimasi tidak valid. Adanya berbagai faktor yang tidak semuanya masuk ke dalam persamaan dan perbedaan unit observasi memungkinkan intersep yang berbeda begitu juga dengan koefisien regresi atau slopenya. Maka dari itu selanjutnya terjadi pembentukan model *fixed effects*. Efek tetap dimaksudkan bahwa satu objek observasi memiliki konstanta yang tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian juga koefisien regresinya akan tetap dari waktu ke waktu. Maka persamaan model ini sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta' X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Ket:

β' = koefisien intersep

X_{it} = banyaknya data panel (variable)

i = banyaknya individu/unit observasi (provinsi)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2006-2015)

Dalam penggunaan estimasi dengan *least square dummy variable* (LSDV) yang dilakukan untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, yakni dengan memasukkan variabel semu (*dummy variable*). Ini akan menjelaskan terjadinya perbedaan nilai intersep yang berbeda sebagai akibat perbedaan dari *cross section*. Maka persamaan model LSDV akan menjadi:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_2 D_{2it} + \beta_3 D_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Ket:

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien intersep

X_{1it}, X_{2it} = variabel bebas

D_1, D_2, D_3 = variabel semu dengan bentuk 1 dan 0

i = banyaknya individu/unit observasi (provinsi)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2006-2015)

3.3.3 Model Random Effect

Di dalam mengestimasi data panel dengan model *Fixed Effectss* melalui teknik *LSDV* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengatasi masalah ini kita bisa menggunakan variable residual yang dikenal sebagai model *Random Effectss*. Model ini perbedaan pada *fixed effects* diakomodasikan dengan *error*. Pada model ini, akan dipilih estimasi data panel dimana error mungkin saling berhubungan koefisien regresi dan konstanta. Oleh karena itu, pada model ini diasumsikan bahwa ada perbedaan intersep untuk setiap individu dan intersep tersebut merupakan disebabkan oleh residual/error dan secara variable random atau stakastik. Sehingga dalam model ini terdapat dua komponen residual, yaitu residual secara menyeluruh, yang merupakan kombinasi *time series* dan *cross section*, dan residual secara individu yang merupakan karakteristik random dari observasi unit ke- i dan tetap sepanjang waktu. Persamaan model ini adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta' X_{it} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Ket:

β' = koefisien intersep

X_{it} = banyaknya data panel (variable)

μ_i = *random error term*

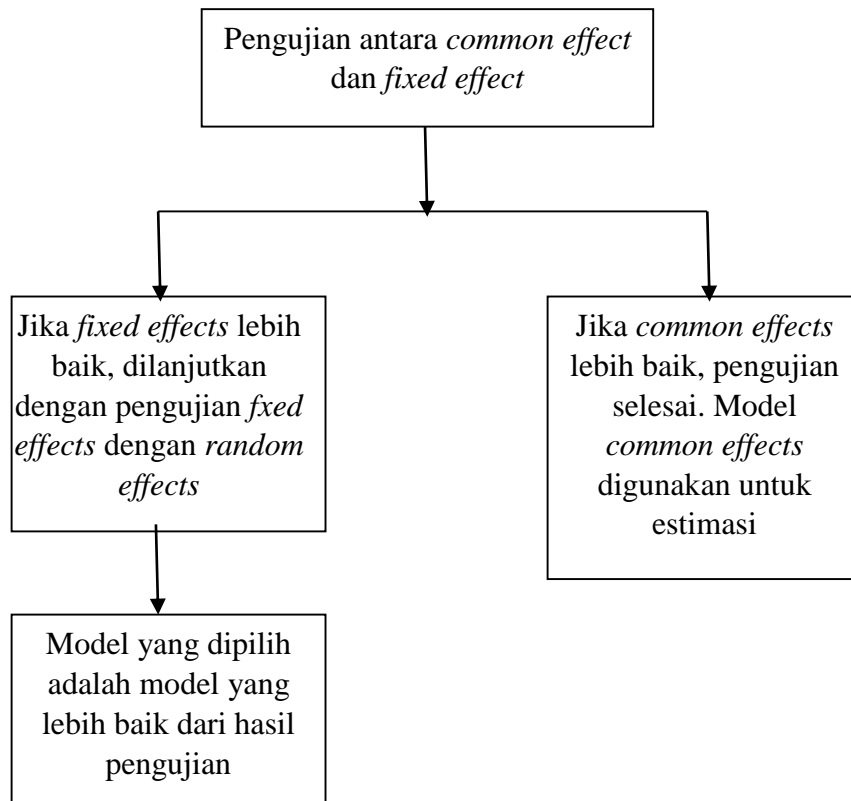
i = banyaknya individu/unit observasi (provinsi)

t = banyaknya waktu (periode tahun 2006-2015)

3.3.4 Analisis Data

- 1) Pemilihan Model Regresi: Pemilihan Model dalam Pengolahan Data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien.

Gambar 3.1 Prosedur Pengujian Pemilihan Model



Sumber: (Sriyana, Metode Regresi Data Panel, 2014)

Penjelasan dari gambar 3.1 di atas adalah pengujian pemilihan model. Pengujian pertama dilakukan untuk membandingkan antara *fixed effects* dan *common effects* dengan uji *signifikansi fixed effects*. Jika dari hasil uji pertama ini didapatkan metode *common effects* adalah model terbaik, maka pengujian cukup pada tahap pertama dengan menggunakan metode tersebut. Namun jika hasil pengujian pertama didapatkan hasil metode *fixed effects* adalah model terbaik, maka dilanjutkan pengujian kedua. Pengujian yang kedua dilakukan untuk membandingkan antara model *fixed effects* dan *random effects* dengan menggunakan uji Hausman. Jika dari hasil uji pertama ini

didapatkan metode *fixed effects* adalah model terbaik, maka pengujian cukup pada tahap pertama dengan menggunakan metode tersebut. Namun jika hasil pengujian pertama didapatkan hasil metode *random effects* adalah model terbaik, maka gunakanlah metode tersebut. Terdapat tiga uji yang dapat dilakukan untuk menentukan penggunaan metode estimasi yang terbaik, yaitu:

a) Uji *Chow Test*

Uji *chow test* dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *common effects* atau *fixed effects*. Hipotesis dari *chow test* adalah:

H₀: $F \text{ stat} \leq F \text{ tabel}$, maka model *common effects* yang valid digunakan.

H₁: $F \text{ stat} > F \text{ tabel}$, maka model *fixed effects* yang valid digunakan.

b) Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Sebelumnya, harus dilakukan uji signifikansi terlebih dahulu pada model *random effects*. Uji LM ini dilakukan untuk mengetahui pendekatan mana yang lebih baik antara *random effects* atau *common effects*.

H₀: $LM \text{ hitung} \leq \chi^2 \text{ (Chi Square) tabel}$, maka model *common effects* yang valid digunakan.

H₁: $LM \text{ hitung} > \chi^2 \text{ (Chi Square) tabel}$, maka model *random effects* yang valid digunakan.

c) Uji *Hausman Test*

Uji ini selanjutnya membahas tentang pemilihan metode yang terbaik antara *fixed effects* dan *random effects*. Uji Hausman dilakukan dengan menggunakan alat bantu Eviews. Untuk melakukan uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

H₀: Model *Random Effects*

H₁: Model *Fixed Effects*

2) Uji Statistik

a) Uji T (Pengujian variable secara individu)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variable independen terhadap variable dependen secara imdividu. Uji ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Jika hipotesis signifikan positif, maka:

H₀ : $\beta_i \leq 0$

H₁ : $\beta_i > 0$

Jika hipotesis signifikan negatif, maka:

H₀ : $\beta_i \geq 0$

H₁: $\beta_i < 0$

Menentukan tingkat signifikan (α) 5%

Kriteria Pengujian:

Jika nilai Prob. T-statistic > 0.05, maka H₀ diterima, artinya variable bebas tidak mempengaruhi variable terikat secara signifikan. Jika nilai Prob.T-statistic <

0.05, maka H_0 ditolak, artinya variable bebas mempengaruhi variable terikat secara signifikan.

b) Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh)

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak variable-variable independen terhadap variable dependen secara menyeluruh. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variable-variable dependen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variable dependen. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 : Minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan α (5%), jika prob f-stat $< \alpha$ maka menolak H_0 , yang artinya variabel independen secara menyeluruh mempengaruhi variable dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat $> \alpha$ maka gagal menolak H_0 maka variable independen secara menyeluruh tidak mempengaruhi variable dependen.

3.4 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti di Indonesia, memilih lokasi ini karena ingin tahu bagaimana pertumbuhan dan kesenjangan yang terjadi di 33 Provinsi di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2015. Karena melihat kondisi pendapatan para pekerja yang tidak sesuai fakta. Di beberapa provinsi banyak pekerja yang tidak menerima upah sesuai dengan kebijakan Upah Minimum yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis dari Jumlah Kemampuan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, dan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 Provinsi Indonesia pada tahun 2006-2015. Penelitian ini menggunakan metode data panel yang menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section*. Jumlah data yang digunakan berjumlah 10 tahun secara berurutan dari tahun 2006 sampai dengan 2015 dengan mencakup 33 Provinsi di Indonesia. Analisis ini dibantu menggunakan alat analisis berupa aplikasi atau *software E-views 9*.

4.2 Deskripsi Objek Data Penelitian

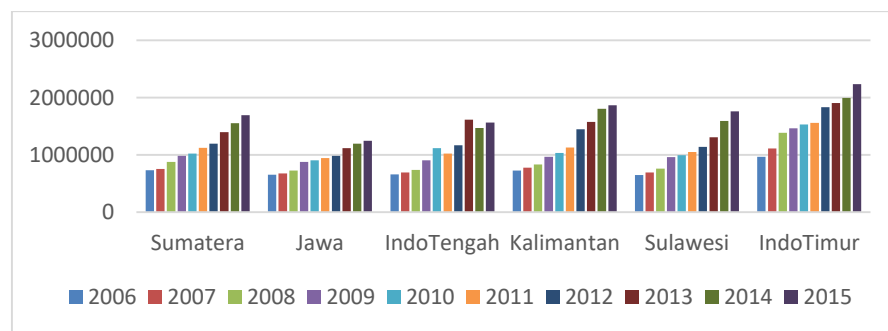
4.2.1 Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimal yang digunakan untuk memberikan upah kepada para pekerja oleh para pengusaha dalam lingkungan usaha atau kerjanya dalam penerimaan satu bulan. Pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, ini yang disebut dengan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Regional atau UMR. Upah minimum ini dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu perjanjian. Sebagai mana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 dan Undang-undang No. 13 tahun 2003.

4.2.2 Kebutuhan Hidup Layak

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 Kebutuhan Hidup Layak atau KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang masih berstatus lajang sedang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak baik secara fisik, non fisik, dan social dalam kebutuhannya selama 1 bulan. Nilai KHL diperoleh dari survey berbagai harga dengan pencapaian KHL yang didapatkan dari memperhatikan kondisi pasar kerja, dan usaha paling tidak mampu (marginal) di Propinsi/Kabupaten/Kota. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah KHL.

Gambar 4. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Belanja Kebutuhan Hidup Layak Provinsi di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

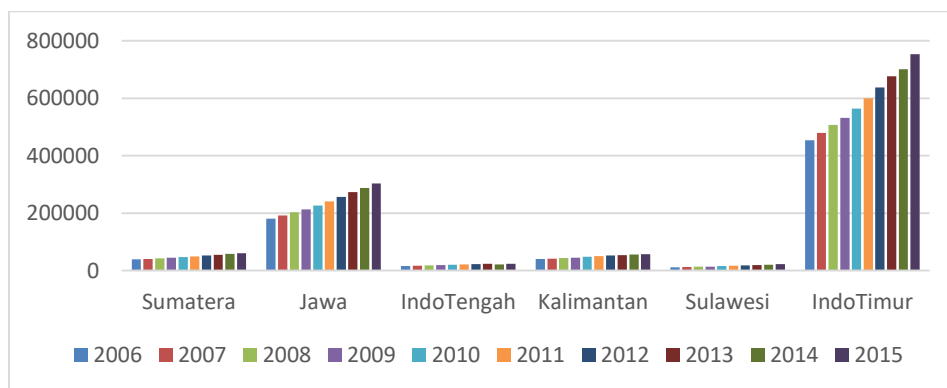
Dalam gambar 4.1 di atas ini menunjukkan perkembangan jumlah kebutuhan hidup layak perprovinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2006-2015. Dari tahun ke tahun jumlah kemampuan hidup layak mengalami peningkatan. Dari grafik di atas dapat dilihat peningkatan yang paling rendah di pulau jawa, karena perkembangan

terendah ada pada provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2006 sebesar Rp582128 meningkat menjadi Rp857728. Perkembangan ini merupakan cerminan dari pengeluaran untuk kebutuhan para pekerja yang harus dipenuhi secara layak.

4.2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto dari penjelasan Gregory Mankiw adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada periode tertentu. Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mengukur kinerja keseluruhan yang jumlahnya.

Gambar 4. 2 Grafik Perkembangan Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia (juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

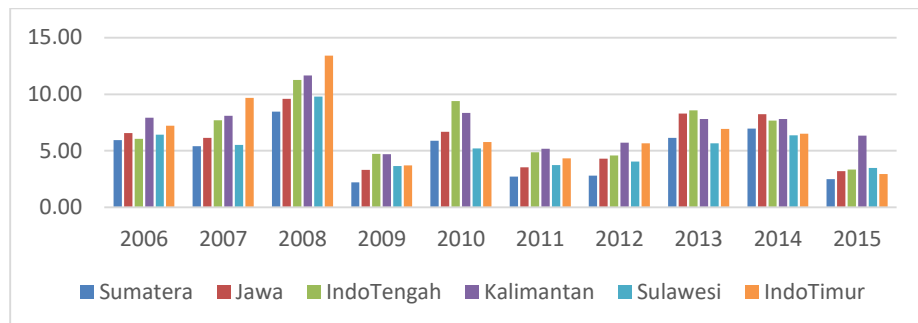
Pada gambar 4.2 tersebut di atas, menunjukkan perkembangan PDRB yang terjadi di provinsi Indonesia terutama pada kepulauan Indonesia bagian Timur. PDRB di Indonesia periode tahun 2006-2015 cenderung meningkat meskipun tidak terlalu tinggi setiap tahunnya. Jumlah PDRB total seluruh provinsi pada tahun 2006 sebesar

3564814.61 meningkat menjadi 5873874.09 pada tahun 2015. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu ada peningkatan pada kinerja perekonomian, sehingga selalu terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang bisa di lihat dari peningkatan pada data PDRB tersebut.

4.2.4 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai terjadinya kenaikan seluruh tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus menerus. Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam setiap menghadapi permasalahan inflasi. Karena inflasi adalah salah satu faktor dalam peran kesejahteraan masyarakat.

Gambar 4. 3 Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

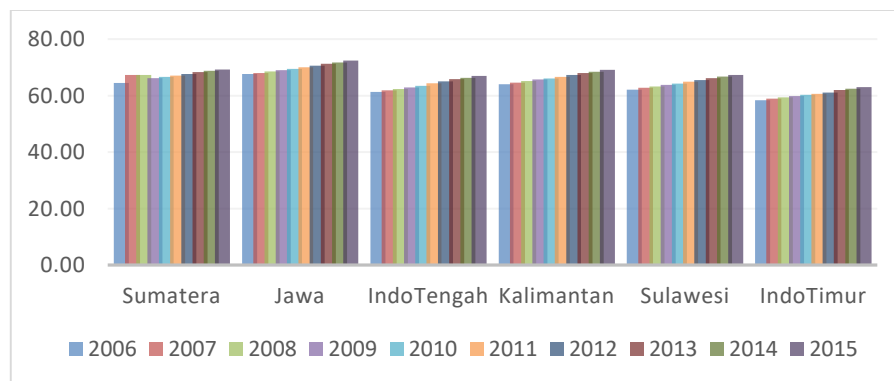
Pada gambar 4.3 di atas, menunjukkan tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Indonesia pada periode tahun 2006-2015. Dapat dilihat pada data tersebut inflasi yang terjadi sangat fluktuasi dengan tajam. Sehingga tidak ada ke stabilan dalam tingkat inflasi pada periode tersebut. Rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan tingkat inflasi rata-rata sebesar 10.14. Menurut keadaan yang ada, pada tahun ini

terjadi krisis finansial di Indonesia yang diakibatkan dari adanya krisis global. Krisis global ini terjadi karena adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, yang disumbangkan dari penurunan pada negara-negara maju. Ini membuat dampak penurunan nilai mata uang Indonesia. Ketika nilai mata uang turun, harga-harga barang atau faktor-faktor produksi yang harus diimport akan mahal. Maka hal tersebut memicu terjadinya kenaikan harga output-output yang ada.

4.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari penjelasan Badan Pusat Statistik adalah pencapaian komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar dalam penentuan kualitas hidup. Perhitungan IPM didasarkan pada 3 pendekatan dimensi yaitu, umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kemampuan pemenuhan kebutuhan secara layak.

Gambar 4. 4 Grafik Perkembangan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tiap Provinsi di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada tabel 4.4 di halaman sebelumnya, menunjukkan tingkat IPM yang terjadi di Provinsi Indonesia pada periode tahun 2006-2015. Dari data tersebut terlihat pembangunan kualitas manusia di setiap provinsi di Indonesia meningkat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mempunyai kinerja sumber daya manusia yang lebih baik. Hal ini akan membantu para pengusaha dalam setiap kegiatannya, sehingga para pekerja bisa mendapatkan upah yang sesuai dengan keadaan kinerjanya.

4.3 Persamaan Regresi

Hubungan antara KHL, PDRB, Inflasi, dan IPM dengan Tingkat UMR di Provinsi Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan:

$$\text{LogUMR}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogKHL}_{it} + \beta_2 \text{LogPDRB}_{it} + \beta_3 \text{INF}_{it} + \beta_4 \text{IPM}_{it} + \text{uit}$$

Dimana:

UMR = Upah minimum regional (ribuan)

KHL = Kebutuhan hidup layak (ribuan)

PDRB = Produk domestic regional bruto (ribuan)

INF = Inflasi (persen)

IPM = Indeks pembangunan manusia (persen)

i = Banyaknya individu/unit observasi (33 provinsi di Indonesia)

t = Banyaknya waktu (periode 2006-2015)

4.4 Hasil Estimasi Regresi

4.4.1 Estimasi Common Effect Model

Tabel 4. 1 Estimasi Hasil Output Regresi Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/27/18 Time: 08:14				
Sample: 2006 2015				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347731	0.334283	1.040230	0.2990
LOG(X1?)	0.900458	0.023148	38.89997	0.0000
LOG(X2?)	0.027196	0.005583	4.871162	0.0000
X3?	-0.005923	0.002513	-2.356622	0.0190
X4?	0.010172	0.001748	5.817693	0.0000
R-squared	0.842566	Mean dependent var		13.78006
Adjusted R-squared	0.840628	S.D. dependent var		0.374467
S.E. of regression	0.149493	Akaike info criterion		-0.948103
Sum squared resid	7.263120	Schwarz criterion		-0.890541
Log likelihood	161.4370	Hannan-Quinn criter.		-0.925142
F-statistic	434.8386	Durbin-Watson stat		0.665410
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil pengolahan Data Dengan *E-views 9*. 2016.

Dari hasil pengolahan regresi di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) sebesar 0.842566%, yang artinya variable-variabel *independent* dalam data mampu menjelaskan 84.25% terhadap variable *dependent*, dan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model data ini.

4.4.2 Estimasi fixed Effect Model

Tabel 4. 2 Estimasi Hasil Output Regresi fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/27/18 Time: 08:15				
Sample: 2006 2015				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.695132	0.286696	-9.400675	0.0000
LOG(X1?)	0.651442	0.032295	20.17150	0.0000
LOG(X2?)	0.617444	0.051455	11.99964	0.0000
X3?	0.001086	0.001752	0.619974	0.5358
X4?	0.014414	0.003129	4.607180	0.0000
R-squared	0.951652	Mean dependent var		13.78006
Adjusted R-squared	0.945711	S.D. dependent var		0.374467
S.E. of regression	0.087251	Akaike info criterion		-1.934744
Sum squared resid	2.230508	Schwarz criterion		-1.508785
Log likelihood	356.2327	Hannan-Quinn criter.		-1.764835
F-statistic	160.2003	Durbin-Watson stat		1.277810
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan E-views 9. 2016.

Dari hasil pengolahan regresi di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) sebesar 0.951652%, yang artinya variable-variabel *independent* dalam data mampu menjelaskan 95.16% terhadap variable *dependent*, dan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model data ini. Hasil regresi ini juga menunjukkan pengaruh individu pada data konstanta *cross section* dari 33 provinsi di Indonesia.

4.4.3 Estimasi Random Effect Model

Tabel 4. 3 Estimasi Hasil Output Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/27/18 Time: 08:18				
Sample: 2006 2015				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 330				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.847171	0.237216	-3.571304	0.0004
LOG(X1?)	0.926901	0.019996	46.35498	0.0000
LOG(X2?)	0.057143	0.012107	4.719953	0.0000
X3?	0.000176	0.001723	0.102195	0.9187
X4?	0.017403	0.002437	7.140007	0.0000
R-squared	0.899991	Mean dependent var		3.599172
Adjusted R-squared	0.898761	S.D. dependent var		0.327060
S.E. of regression	0.104064	Sum squared resid		3.519546
F-statistic	731.1806	Durbin-Watson stat		1.368211
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan E-views 9. 2016.

Dari hasil pengolahan regresi di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) sebesar 0.899991%, yang artinya variable-variabel *independent* dalam data mampu menjelaskan 89.99% terhadap variable *dependent*, dan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model data ini. Hasil regresi ini juga menunjukkan pengaruh individu pada data konstanta *cross section* dari 33 provinsi di Indonesia.

4.5 Pemilihan Model

Karena analisis ini menggunakan regresi data panel, diharuskan untuk menentukan model pendekatan analisis untuk menemukan model yang paling tepat untuk pengujian selanjutnya. Model yang diuji adalah model *common effect*, *fixed*

effect, dan *random effect*. Pengujian pertama melalui uji-*chow* untuk pemilihan antara model *common effect* atau *fixed effect*. Lalu yang kedua uji-*Hausman* untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect*.

4.5.1 Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Uji ini dilakukan untuk memilih model terbaik yang digunakan antara *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis dari uji *chow* ini sebagai berikut:

H₀: *Common effect* yang valid digunakan

H₁: *Fixed effect* yang valid digunakan

Menolak hipotesis H₀ ketika nilai probabilitas $F < \text{Alpha } 0.05$, ini berarti model *fixed effect* lebih baik digunakan. Sebaliknya, jika gagal menolak H₀ maka model *common effect* lebih baik digunakan.

Berikut tabel hasil dari *Likelihood Ratio Test (Cho Test)*.

Tabel 4. 4 Hasil dari Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.658899	(32,293)	0.0000
Cross-section Chi-square	389.591368	32	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan *E-views 9*. 2016.

Dari hasil pengujian tersebut pada tabel 4.4 diperoleh nilai probabilitas dari *cross-section* F sebesar $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$. Maka hasil uji ini memilih menolak hipotesis H_0 , yang berarti model *fixed effect* lebih baik digunakan.

4.5.2 Hausman Test

Uji ini dilakukan untuk memilih model terbaik yang digunakan antara *fixed effect* atau *random effect*. Hipotesis dari uji *chow* ini sebagai berikut:

H_0 : *Random effect* yang valid digunakan

H_1 : *Fixed effect* yang valid digunakan

Menolak hipotesis H_0 ketika nilai probabilitas $F < \text{Alpha } 0.05$, ini berarti model *fixed effect* lebih baik digunakan. Sebaliknya, jika gagal menolak H_0 maka model *random effect* lebih baik digunakan. Berikut tabel hasil dari *Hausman Test*.

Tabel 4. 5 Hasil dari Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	141.328220	4	0.0000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan *E-views* 9. 2016.

Dari hasil pengujian tersebut pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas dari *cross-section random* F sebesar $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$. Maka hasil uji ini memilih menolak hipotesis H_0 , yang berarti model *fixed effect* lebih baik digunakan.

4.6 Model Terbaik

4.6.1 Model Fixed Effect

Dari hasil pengujian uji *chow* dan uji *hausman* di atas, sudah terpilih model terbaik yang akan digunakan untuk analisis. Mode yang akan digunakan adalah regresi model *fixed effect*.

Tabel 4. 6 Hasil Regresi Model Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/27/18 Time: 08:15				
Sample: 2006 2015				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.695132	0.286696	-9.400675	0.0000
LOG(X1?)	0.651442	0.032295	20.17150	0.0000
LOG(X2?)	0.617444	0.051455	11.99964	0.0000
X3?	0.001086	0.001752	0.619974	0.5358
X4?	0.014414	0.003129	4.607180	0.0000
R-squared	0.951652	Mean dependent var		13.78006
Adjusted R-squared	0.945711	S.D. dependent var		0.374467
S.E. of regression	0.087251	Akaike info criterion		-1.934744
Sum squared resid	2.230508	Schwarz criterion		-1.508785
Log likelihood	356.2327	Hannan-Quinn criter.		-1.764835
F-statistic	160.2003	Durbin-Watson stat		1.277810
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Dengan *E-views 9*. 2016.

Tabel 4. 7 Konstanta Antar Daerah

Provinsi	Effect	C	Konstanta
ACEH	0.1254	-2.695132	-2.56973
SUMUT	-0.62151	-2.695132	-3.31664
SUMBAR	-0.016576	-2.695132	-2.71171
RIAU	-0.614438	-2.695132	-3.30957
JAMBI	0.469969	-2.695132	-2.22516
SUMSEL	-0.351109	-2.695132	-3.04624
BENGKULU	0.902891	-2.695132	-1.79224
LAMPUNG	-0.043117	-2.695132	-2.73825
BKBELITUNG	0.600249	-2.695132	-2.09488
KEPRI	-0.149675	-2.695132	-2.84481
JAKARTA	-1.497211	-2.695132	-4.19234
JABAR	-1.496801	-2.695132	-4.19193
JATENG	-1.195088	-2.695132	-3.89022
DIY	0.093566	-2.695132	-2.60157
JATIM	-1.527111	-2.695132	-4.22224
BANTEN	-0.540703	-2.695132	-3.23584
BALI	-0.028836	-2.695132	-2.72397
NTB	0.456319	-2.695132	-2.23881
NTT	0.579864	-2.695132	-2.11527
KALBAR	0.019482	-2.695132	-2.67565
KALTENG	0.387959	-2.695132	-2.30717
KALSEL	0.202793	-2.695132	-2.49234
KALTIM	-0.746464	-2.695132	-3.4416
SULUT	0.584196	-2.695132	-2.11094
SLTENG	-0.249451	-2.695132	-2.94458
SULSEL	0.740347	-2.695132	-1.95479
SULTRA	1.544435	-2.695132	-1.1507
GORONTALO	1.126287	-2.695132	-1.56885
SULBAR	1.304521	-2.695132	-1.39061
MALUKU	1.257359	-2.695132	-1.43777
MALUT	0.552307	-2.695132	-2.14283
PAPBAR	0.459412	-2.695132	-2.23572
PAPUA	-2.329264	-2.695132	-5.0244

Sumber: Olahan Data Dengan E-views 9.

Pada tabel 4.7 di halaman sebelumnya menunjukkan nilai konstanta dari masing-masing provinsi di Indonesia tahun 2006-2015. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Papua mempunyai nilai konstanta dan tingkat upah minimum terkecil yaitu -5.0244, dan nilai konstanta dan tingkat upah minimum terbesar berada pada Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -1.1507.

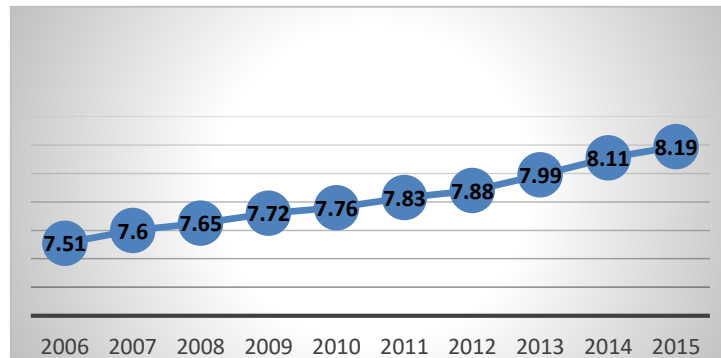
Tabel 4. 8 Konstanta Tahunan (Fixed Effect Period)

Tahun	Effect	C	Konstanta
2006	-0.310449	7.828838	7.518389
2007	-0.222415	7.828838	7.606423
2008	-0.169907	7.828838	7.658931
2009	-0.105541	7.828838	7.723297
2010	-0.061446	7.828838	7.767392
2011	0.0017	7.828838	7.830538
2012	0.053345	7.828838	7.882183
2013	0.165609	7.828838	7.994447
2014	0.283701	7.828838	8.112539
2015	0.365403	7.828838	8.194241

Sumber: Olahan Data Dengan E-views 9

Tabel di atas menunjukkan nilai konstanta period yang menunjukkan bahwa perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia pada periode tahun 2006-2015 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Perkembangan tersebut juga terlihat pada gambar grafik 4.5 di halaman selanjutnya.

Gambar 4. 5 Grafik Konstanta Fixed Effect Period dalam Faktor Penentu Kebijakan UMR di Indonesia tahun 2006-2015



Sumber: Olahan Data Excel 2007

4.7 Analisis Hasil Regresi

4.7.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R-squared adalah ukuran yang dipergunakan untuk analisis regresi yang menunjukkan besar sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R-squared jika mendekati angka 1 akan semakin baik hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya dan model tersebut dapat dibenarkan.

Berdasarkan dari hasil estimasi regresi menggunakan model *fixed effect* didapati nilai R-squared sebesar 0.951652%, yang artinya variabel-variabel *independent* dalam data mampu menjelaskan 95.16% terhadap variabel *dependent*, dan sisanya dijelaskan oleh faktor diluar model data ini

4.7.2 Uji Signifikansi Bersama (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dari hasil yang didapatkan jika nilai probabilitas F sebesar $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$, maka berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya.

4.7.3 Uji T-statistik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 4. 9 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.	Keterangan
LOG(KHL)	0.651442	20.1715	0.0000	Signifikan
LOG(PDRB)	0.617444	11.99964	0.0000	Signifikan
INF	0.001086	0.619974	0.5358	Tidak Signifikan
IPM	0.014414	4.60718	0.0000	Signifikan

Sumber: Olahan Data Dengan *E-views 9*.

1) Jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.9 didapatkan nilai probabilitas dari KHL sebesar $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$. Ini berarti bahwa KHL signifikan berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Serta pengaruhnya positif pada nilai *coefficient* 0.651442, artinya jika terjadi kenaikan pada jumlah KHL sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pada tingkat upah minimum sebesar 0.651442%.

2) Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.9 didapatkan nilai probabilitas dari PDRB sebesar $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$. Ini berarti bahwa PDRB signifikan berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Serta pengaruhnya positif pada nilai *coefficient* 0.617444, artinya jika terjadi kenaikan pada jumlah PDRB sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pada tingkat upah minimum sebesar 0.617444%.

3) Inflasi

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.9 didapatkan nilai probabilitas dari Inflasi sebesar $0.5358 > \text{Alpha } 0.05$. Ini berarti bahwa inflasi tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia.

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.9 didapatkan nilai probabilitas dari IPM sebesar $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$. Ini berarti bahwa IPM signifikan berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Serta pengaruhnya positif pada nilai *coefficient* 0.014414, artinya jika terjadi kenaikan pada jumlah IPM sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pada tingkat upah minimum sebesar 0.014414%.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Analisis Pengaruh Jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah KHL signifikan berpengaruh pada penentuan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia. Ketika terjadi kenaikan jumlah KHL maka akan diikuti perubahan peningkatan juga pada tingkat upah minimum provinsinya.

Dari penjelasan di atas, analisis ini sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh (Desmiwati, 2013 dan Merdekawati, 2016), yang menyatakan bahwa jumlah KHL berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Karena peran KHL mencerminkan dari tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi para pekerja. Sehingga ketika jumlah kebutuhan tersebut meningkat maka pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut dengan cara memperhitungkan kembali tingkat upah minimum sebelumnya dengan jumlah KHL yang meningkat. Sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

4.8.2 Analisis Pengaruh Jumlah Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah PDRB signifikan berpengaruh pada penentuan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.

Ketika terjadi kenaikan jumlah PDRB maka akan diikuti perubahan peningkatan juga pada tingkat upah minimum provisinnya.

Dari penjelasan di atas, analisis ini tidak sesuai dengan hasil analisis (Nurtyas, 2016), yang menyatakan bahwa jumlah PDRB signifikan berpengaruh secara negatif. Namun analisis ini sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh (Desmiwati, 2013), yang menyatakan bahwa jumlah PDRB berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Bahwa dalam penetapan upah minimum pemerintah dan yang berwenang menggunakan PDRB dalam penentuan tingkat upah minimum. Ketika terjadi peningkatan pada PDRB tingkat upah minimum juga akan di tingkatkan. Peningkatan output ini merupakan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sehingga bisa menunjukkan kinerja para pekerja.

4.8.3 Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak signifikan dan tidak berpengaruh pada penentuan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia. Analisis ini tidak sama dengan hasil penelitian (Charysa, 2013), yang menyatakan bahwa inflasi signifikan berpengaruh negatif terhadap upah minimum. Namun, analisis ini sesuai dengan penelitian (Ilham, 2013) yang hasil penelitiannya tidak sesuai juga dengan teori yang ada, bahwa inflasi berhubungan dengan tingkat upah. Dimana ketika terjadi peningkatan harga atau inflasi mengakibatkan nilai riil upah menurun dan membuat rugi para pekerja.

Permasalahan tidak adanya pengaruh inflasi terhadap penetapan tingkat inflasi pada analisis ini dimungkinkan karena inflasi yang terjadi di Provinsi Indonesia sangat berfluktuasi dengan tingkat tinggi-rendah yang sangat tajam perubahannya tiap tahun. Sehingga jika inflasi berpengaruh secara negatif, ketika inflasi tersebut menjulang tinggi, akan membuat pendapatan para pekerja merugi. Karena itu pemerintah di sini melakukan penekanan terhadap para pemberi upah untuk tetap mempertahankan tingkat upah minimum pada tingkat inflasi tinggi dan tidak menurunkan upah para pekerja. Walaupun pendapatan riil mereka secara tidak langsung menurun.

4.8.4 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa IPM signifikan berpengaruh pada penentuan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia. Ketika terjadi kenaikan IPM maka akan diikuti perubahan peningkatan juga pada tingkat upah minimum provinsinya.

Hasil ini sesuai dengan penjelasan (Susanto, 2015 dan Yanty, 2017), bahwa hubungan antara IPM dengan tingkat upah minimum itu berpengaruh. IPM adalah salah satu ukuran pembangunan pada kualitas manusia di suatu negara, yang bisa jg dijadikan cerminan kinerja para pekerja. Dimana ketika para kualitas kinerja para pekerja semakin baik dalam bekerja, maka akan semakin disukai para perusahaan dan menguntungkan perusahaan. Di sini lah dimana tingkat upah akan menjadi lebi tinggi, dan membuat perhatian untuk menentukan tingkat upah minimum.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis yang menggunakan aplikasi *e-views* 9 terhadap hipotesis yang telah disusun dan telah diatur sebelumnya. Dapat disimpulkan dan didapat dari penelitian ini adalah:

- 1) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa jumlah Kemampuan Hidup Layak (KHL) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan pada jumlah KHL maka akan meningkatkan pula tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.
- 2) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan pada jumlah PDRB maka akan meningkatkan pula tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.
- 3) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan atau penurunan pada inflasi tidak akan mempengaruhi tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.
- 4) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum.

Ini berarti ketika terjadi peningkatan pada IPM maka akan meningkatkan pula tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.

5.2 Implikasi

Dari hasil analisis pengaruh jumlah Kemampuan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penetapan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia pada periode tahun 2006-2015 didapatkan beberapa implikasi, yaitu:

- 1) Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan upah minimum ini sesuai dengan keadaan dan kondisi pada kenyataan, dan mampu diterima oleh para pemberi upah dan buruh. Sehingga menciptakan hubungan yang baik setara dan seimbang antara para pekerja dan perusahaan dalam perjanjiannya.
- 2) Pemenuhan perhatian dalam jumlah kebutuhan minimum para pekerja bahkan masyarakat sebaiknya lebih baik lagi. Karena tingkat upah minimum saat ini masih sekitar 90% pada pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam penetapan upah ini pemerintah harus tetap memperhatikan hubungannya antara inflasi, karena terjadinya inflasi secara langsung akan menaikkan beberapa harga barang kebutuhan sehingga pengeluaran tersebut juga akan meningkat.
- 4) Hendaknya pemerintah memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia, terutama pada penekanan inflasi pada daerah-daerah tertentu yang

tingkat inflasinya tinggi. Bisa dilakukan subsidi untuk para perusahaan dalam kegiatan produksi produsen yang akan menurunkan biaya produksi mereka dan membuat harga outputpun menurun dan stabil. Sehingga inflasi dapat terkendali dan upah nominal para pekerja sebanding dengan upah riilnya.

- 5) Diperlukan kesesuaian antara sistem kebijakan pengupahan dengan sasaran kebijakan dan keterlibatan pihak terkait yang diharapkan lebih baik lagi perhatiannya dalam memonitoring penetapan upah para pekerja yang diberikan kepada para pekerja secara layak.

Daftar Putaska

- Badan Pusat Statistik. (2017, 06 20). *Data Tenaga Kerja*. Retrieved 10 23, 2017, from Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/969>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Retrieved 10 10, 2017, from Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *IPM*. Retrieved 10 10, 2017, from Badan Pusat Statistik:
<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>
- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inlfasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal, Vol. 2, No.4, 277-285*.
- Desmiwati. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Minimum di Indonesia 2001-2008. *Tesis S-2 (Tidak Dipublikasikan), Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia. Jakarta*.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JOM Fekon, Vol. 4, No.1, 872*.
- Feriyanto, N. (1997). Upah Minimum Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 2, 196-204*.
- Human Development Report. (1995). In *Human Development Report*. New York: Oxford Univeesity Press 1995.

- Kistanto, I. (2013). Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Jember. *Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Jember.*
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Ed. Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- McCafferty, Stephen. (1990). *Macroeconomic Theory*. New York: Harpercollins College Div.
- Merdekawati, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan metode Autoregressive (SAR). *Jurnal Gaussian, Vol. 5, No. 3, 525-534.*
- Murni, A. (2013). *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nindya, F. H. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa 2010-2014. *Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.*
- Putri, D. (2016). Analisis Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Tahun (2006-2014). *Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*
- Sari, Izzati dan Rafika. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 2, 131-145.*
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sukirno, S. (2014). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, B. S. (2015). Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum di Indonesia. *Journal of Management, Vol. 1, No.1*, 21-32.
- Thamrin. (2017). Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum. *UR Law Review. Vol. 01, No. 01*, 39-48.
- Wibowo, A. (2011). Retrieved 10 11, 2017, from Digilib Unila: <http://digilib.unila.ac.id/6537/17/BAB%20II.pdf>
- Yanty, R. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kebutuhan Hidup Minimum terhadap Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2015. *Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.*

LAMPIRAN

Lampiran 1 Estimasi Output Hasil Regresi Common Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/27/18 Time: 08:14				
Sample: 2006 2015				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347731	0.334283	1.040230	0.2990
LOG(X1?)	0.900458	0.023148	38.89997	0.0000
LOG(X2?)	0.027196	0.005583	4.871162	0.0000
X3?	-0.005923	0.002513	-2.356622	0.0190
X4?	0.010172	0.001748	5.817693	0.0000
R-squared	0.842566	Mean dependent var		13.78006
Adjusted R-squared	0.840628	S.D. dependent var		0.374467
S.E. of regression	0.149493	Akaike info criterion		-0.948103
Sum squared resid	7.263120	Schwarz criterion		-0.890541
Log likelihood	161.4370	Hannan-Quinn criter.		-0.925142
F-statistic	434.8386	Durbin-Watson stat		0.665410
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 2 Estimasi Output Hasil Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)	
Method: Pooled Least Squares	
Date: 01/27/18 Time: 08:15	
Sample: 2006 2015	
Included observations: 10	
Cross-sections included: 33	

Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.695132	0.286696	-9.400675	0.0000
LOG(X1?)	0.651442	0.032295	20.17150	0.0000
LOG(X2?)	0.617444	0.051455	11.99964	0.0000
X3?	0.001086	0.001752	0.619974	0.5358
X4?	0.014414	0.003129	4.607180	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH—C	0.125400			
_SUMUT—C	-0.621510			
_SUMBAR—C	-0.016576			
_RIAU—C	-0.614438			
_JAMBI—C	0.469969			
_SUMSEL—C	-0.351109			
_BENGKULU—C	0.902891			
_LAMPUNG—C	-0.043117			
_BKBELITUNG—C	0.600249			
_KEPRI—C	-0.149675			
_JAKARTA—C	-1.497211			
_JABAR—C	-1.496801			
_JATENG—C	-1.195088			
_DIY—C	0.093566			
_JATIM—C	-1.527111			
_BANTEN—C	-0.540703			
_BALI—C	-0.028836			
_NTB—C	0.456319			
_NTT—C	0.579864			
_KALBAR—C	0.019482			
_KALTENG—C	0.387959			
_KALSEL—C	0.202793			
_KALTIM—C	-0.746464			
_SULUT—C	0.584196			
_SULTENG—C	-0.249451			
_SULSEL—C	0.740347			
_SULTRA—C	1.544435			
_GORONTALO—C	1.126287			
_SULBAR—C	1.304521			
_MALUKU—C	1.257359			

Lampiran 2 (lanjutan)

_MALUT—C	0.552307
_PAPBAR—C	0.459412
_PAPUA—C	-2.329264
Effects Specification	

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.951652	Mean dependent var	13.78006
Adjusted R-squared	0.945711	S.D. dependent var	0.374467
S.E. of regression	0.087251	Akaike info criterion	-1.934744
Sum squared resid	2.230508	Schwarz criterion	-1.508785
Log likelihood	356.2327	Hannan-Quinn criter.	-1.764835
F-statistic	160.2003	Durbin-Watson stat	1.277810
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3 Estimasi Output Hasil Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/27/18 Time: 08:18
Sample: 2006 2015
Included observations: 10

Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 330
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.847171	0.237216	-3.571304	0.0004
LOG(X1?)	0.926901	0.019996	46.35498	0.0000
LOG(X2?)	0.057143	0.012107	4.719953	0.0000
X3?	0.000176	0.001723	0.102195	0.9187
X4?	0.017403	0.002437	7.140007	0.0000
Random Effects (Cross)				
_ACEH—C	0.069423			
_SUMUT—C	0.096673			
_SUMBAR—C	0.054769			
_RIAU—C	-0.060064			
_JAMBI—C	0.108752			
_SUMSEL—C	-0.021183			
_BENGKULU—C	0.161397			
_LAMPUNG—C	0.080027			
_BKBELITUNG—C	-0.091360			
_KEPRI—C	-0.081134			
_JAKARTA—C	-0.217584			
_JABAR—C	-0.137194			
_JATENG—C	-0.134738			
_DIY—C	-0.114082			
_JATIM—C	-0.101644			
_BANTEN—C	0.008112			
_BALI—C	-0.122127			
_NTB—C	0.086327			
_NTT—C	0.048684			
_KALBAR—C	-0.011492			
_KALTENG—C	0.020887			
_KALSEL—C	0.138455			
_KALTIM—C	-0.158899			
_SULUT—C	0.215266			
_SULTENG—C	0.036776			
_SULSEL—C	0.133657			
_SULTRA—C	0.186991			
_GORONTALO—C	0.038534			
_SULBAR—C	0.118028			

Lampiran 3 (lanjutan)

_MALUKU—C	-0.174056
_MALUT—C	-0.218400
_PAPBAR—C	0.105297
_PAPUA—C	-0.064096

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.101970	0.5773
Idiosyncratic random		0.087251	0.4227
Weighted Statistics			
R-squared	0.899991	Mean dependent var	3.599172
Adjusted R-squared	0.898761	S.D. dependent var	0.327060
S.E. of regression	0.104064	Sum squared resid	3.519546
F-statistic	731.1806	Durbin-Watson stat	1.368211
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.815070	Mean dependent var	13.78006
Sum squared resid	8.531603	Durbin-Watson stat	0.564429

Lampiran 4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

Cross-section F	20.658899	(32,293)	0.0000	
Cross-section Chi-square	389.591368	32	0.0000	
<p>Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: LOG(Y?) Method: Panel Least Squares Date: 01/27/18 Time: 08:18 Sample: 2006 2015 Included observations: 10 Cross-sections included: 33 Total pool (balanced) observations: 330</p>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.347731	0.334283	1.040230	0.2990
LOG(X1?)	0.900458	0.023148	38.89997	0.0000
LOG(X2?)	0.027196	0.005583	4.871162	0.0000
X3?	-0.005923	0.002513	-2.356622	0.0190
X4?	0.010172	0.001748	5.817693	0.0000
R-squared	0.842566	Mean dependent var	13.78006	
Adjusted R-squared	0.840628	S.D. dependent var	0.374467	
S.E. of regression	0.149493	Akaike info criterion	-0.948103	
Sum squared resid	7.263120	Schwarz criterion	-0.890541	
Log likelihood	161.4370	Hannan-Quinn criter.	-0.925142	
F-statistic	434.8386	Durbin-Watson stat	0.665410	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	141.328220	4	0.0000	
Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(X1?)	0.651442	0.926901	0.000643	0.0000
LOG(X2?)	0.617444	0.057143	0.002501	0.0000
X3?	0.001086	0.000176	0.000000	0.0042
X4?	0.014414	0.017403	0.000004	0.1275
Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LOG(Y?) Method: Panel Least Squares Date: 01/27/18 Time: 08:19 Sample: 2006 2015 Included observations: 10 Cross-sections included: 33 Total pool (balanced) observations: 330				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.695132	0.286696	-9.400675	0.0000
LOG(X1?)	0.651442	0.032295	20.17150	0.0000
LOG(X2?)	0.617444	0.051455	11.99964	0.0000
X3?	0.001086	0.001752	0.619974	0.5358
X4?	0.014414	0.003129	4.607180	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.951652	Mean dependent var		13.78006
Adjusted R-squared	0.945711	S.D. dependent var		0.374467
S.E. of regression	0.087251	Akaike info criterion		-1.934744
Sum squared resid	2.230508	Schwarz criterion		-1.508785
Log likelihood	356.2327	Hannan-Quinn criter.		-1.764835
F-statistic	160.2003	Durbin-Watson stat		1.277810
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 6 Hasil Regresi Terpilih Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOG(Y?)
Method: Pooled Least Squares
Date: 01/27/18 Time: 08:15
Sample: 2006 2015

Included observations: 10
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.695132	0.286696	-9.400675	0.0000
LOG(X1?)	0.651442	0.032295	20.17150	0.0000
LOG(X2?)	0.617444	0.051455	11.99964	0.0000
X3?	0.001086	0.001752	0.619974	0.5358
X4?	0.014414	0.003129	4.607180	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH—C	0.125400			
_SUMUT—C	-0.621510			
_SUMBAR—C	-0.016576			
_RIAU—C	-0.614438			
_JAMBI—C	0.469969			
_SUMSEL—C	-0.351109			
_BENGKULU—C	0.902891			
_LAMPUNG—C	-0.043117			
_BKBELITUNG—C	0.600249			
_KEPRI—C	-0.149675			
_JAKARTA—C	-1.497211			
_JABAR—C	-1.496801			
_JATENG—C	-1.195088			
_DIY—C	0.093566			
_JATIM—C	-1.527111			
_BANTEN—C	-0.540703			
_BALI—C	-0.028836			
_NTB—C	0.456319			
_NTT—C	0.579864			
_KALBAR—C	0.019482			
_KALTENG—C	0.387959			
_KALSEL—C	0.202793			
_KALTIM—C	-0.746464			
_SULUT—C	0.584196			
_SULTENG—C	-0.249451			
_SULSEL—C	0.740347			
_SULTRA—C	1.544435			
_GORONTALO—C	1.126287			
_SULBAR—C	1.304521			
_MALUKU—C	1.257359			

Lampiran 6 (lanjutan)

_MALUT—C	0.552307
_PAPBAR—C	0.459412
_PAPUA—C	-2.329264

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.951652	Mean dependent var	13.78006
Adjusted R-squared	0.945711	S.D. dependent var	0.374467
S.E. of regression	0.087251	Akaike info criterion	-1.934744
Sum squared resid	2.230508	Schwarz criterion	-1.508785
Log likelihood	356.2327	Hannan-Quinn criter.	-1.764835
F-statistic	160.2003	Durbin-Watson stat	1.277810
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 Jumlah Belanja Kebutuhan Hidup Layak Provinsi di Indonesia

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	775000	920000	1200000	1400000	1400000	1476145	1531459	1514383	1726515	1732413

SUMUT	737794	714336	783000	855124	916124	966000	1035028	1295000	1265000	1271058
SUMBAR	668678	760000	871000	896920	979000	1099227	1153456	1384233	1465690	1474227
RIAU	870625	774122	815665	1022669	1053000	1230491	1312888	1499378	1654224	1872000
JAMBI	571142	693000	734169	918121	970662	1027791	1143576	1321572	1502230	1708174
SUMSEL	853000	753000	1100000	929642	1031902	1060921	1311000	1757000	1828698	1974346
BENGKULU	586000	644000	714750	742498	788956	808031	884289	1216089	1260000	1499826
LAMPUNG	589540	554521	650000	805308	861340	897600	1008109	1060082	1399037	1442898
BBELITUNG	714000	830000	978720	1237000	1150500	1562000	1540330	1555206	1802823	2082000
KEP. RIAU	991237	943254	923050	1022000	1073264	1139903	1080332	1395442	1665000	1902598
JAKARTA	831336	991988	1055275	1314059	1317710	1404829	1497838	1978789	2299860	2538174
JABAR	542621	607425	614275	731680	743141	874693	874693	946689	946689	946689
JATENG	582128	586219	612222	793693	803985	833465	833465	857728	857728	857728
DIY	673518	656976	687132	820484	750490	802335	862391	924284	924284	924284
JATIM	580054	458755	544157	706698	856888	731635	731635	825000	825000	825000
BANTEN	735126	764214	851500	917638	955708	1019875	1108000	1170000	1325000	1403556
BALI	742054	704000	711099	956339	959232	1101766	1130779	2117000	1396234	1612818
NTB	570000	643557	727682	860000	1460099	1007000	1222088	1403700	1410294	1430064
NTT	670560	735000	782466	909000	943404	973000	1164204	1336000	1600000	1652137
KALBAR	605017	721564	776928	803914	866250	931146	1327014	1402927	1701665	1504000
KALTENG	850000	753098	825000	910670	947100	1095000	1720414	1919413	2087000	2254000

Lampiran 7 (lanjutan)

KALSEL	684319	768000	790000	947000	997000	1053379	1227000	1227547	1555000	1691000
KALTIM	764756	882797	935440	1209870	1327803	1435374	1531458	1752073	1886315	2026126

SULUT	691224	705000	802035	863731	966372	935000	1077899	1291604	1466472	1641969
SULTENG	615000	635000	733000	915000	890000	900000	900000	1036000	1292817	1499791
SULSEL	672650	677333	754884	1154080	1049321	1083000	1161395	1380500	1760000	1950000
SUTRA	573400	653250	640000	823638	895188	1013769	1232820	1207648	1472581	1621741
GORONTALO	677162	599080	798852	889000	921647	996367	1099222	1539539	1639272	1864379
SULBAR	672650	886493	850000	1126000	1258973	1381470	1381470	1403666	1919487	1981507
MALUKU	1076699	1091195	1182556	1280599	1400990	1570980	1739000	1738676	2158469	2197450
MALUT	926286	1475035	1090127	1520000	1500092	1090000	1903311	1712000	1800000	2333166
PAPBAR	941099	941000	1638746	1325842	1421814	1800000	1800000	2117000	2122472	2255113
PAPUA	941099	941000	1638746	1734054	1799228	1781356	1904000	2069318	1907000	2171944

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Lampiran 8 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia (juta rupiah)

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	36853.87	35983.09	34097.99	32219.09	33103.08	34704.82	36487.88	38012.97	38602.95	38320.87

SUMUT	93347.4	99792.27	106172.4	111559.2	118718.9	126587.6	134461.5	142537.1	149989.2	157633.1
SUMBAR	30949.95	32912.97	35176.63	36683.24	38862.14	41293.35	43925.82	46640.24	49380.8	52107.96
RIAU	83370.87	86213.26	91085.38	93786.24	97735.6	102666	106298.7	109073.1	112023.7	112275
JAMBI	13363.62	14275.16	15297.77	16274.91	17471.69	18963.52	20373.53	21979.28	23596.82	24588.93
SUMSEL	52214.85	55262.11	58065.46	60452.94	63859.14	68008.5	72095.88	76409.76	80070.29	83607.21
BENGGKULU	6610.63	7037.4	7441.87	7859.92	8339.75	8878.82	9464.83	10052.31	10603.08	11147.44
LAMPUNG	30861.36	32694.89	34443.15	36256.3	38389.9	40858.94	43526.87	46123.35	48466.92	50953.78
BBELITUNG	9053.55	9464.54	9899.93	10270.11	10884.95	11592.89	12257.11	12905.01	13507.12	14058.33
KEP. RIAU	32441	34713.81	37014.74	38318.83	41075.86	43809.83	46796.68	49667.22	52945.96	56125.67
JAKARTA	312826.7	332971.3	353723.4	371469.5	395622.4	422242.3	449805.4	477285.3	505514.9	535313.3
JABAR	257499.5	274180.3	291205.8	303405.3	322223.8	343193.6	364752.4	386838.8	406532.9	427003.3
JATENG	150682.7	159110.3	168034.5	176673.5	186993	198270.1	210848.4	223099.7	234860	247698.5
DIY	17535.75	18291.51	19212.48	20064.26	21044.04	22131.77	23308.56	24567.48	25837.19	27116.56
JATIM	271797.9	288404.3	305538.7	320861.2	342280.8	366983.3	393662.9	419428.5	444006	468167.1
BANTEN	71057.64	75349.61	79700.68	83453.73	88552.19	94198.17	99992.41	105856.1	111691.5	117722.9
BALI	23084.3	24449.89	25910.33	27290.95	28882.49	30757.78	32804.38	34787.96	37130.65	39369.4
NTB	15603.77	16369.22	16831.6	18874.4	20072.64	19533.26	19318.51	20417.22	13129.05	15986.94
NTT	10368.5	10902.4	11429.77	11920.6	12546.82	13252.31	13969.78	14746.06	15491.24	16271.11
KALBAR	24541.15	26019.74	27438.79	28756.88	30328.7	32141.38	34007.56	36075.1	39734.42	39734.42
KALTENG	14853.73	15754.51	16726.46	17657.79	18805.68	20078.09	21420.48	22999.68	24428.98	26140.91
KALSEL	24452.26	25922.29	27593.09	29051.63	30675.43	32552.6	34413.31	36196.22	37947.86	39400.85
KALTIM	96612.84	98386.38	103206.9	105564.9	110953.5	115489.9	120085.8	121990.5	124075.8	122578.8
SULUT	12928.3	13961.15	15047.43	16207.6	17624.17	19230.92	21007.97	22979.4	24429.17	25925.38
SULTENG	38867.68	41332.43	44549.82	47326.08	51199.9	55093.74	59718.5	64284.43	67543.17	78027.11
SULSEL	8643.33	9331.72	10010.59	10768.58	11653.91	12698.12	14020.35	15040.86	16174.43	17333.67
SUTRA	2175.82	2339.22	2520.67	2710.74	2917.49	3141.46	3383.82	3646.55	3874.81	4141.46
GORONTALO	3321.15	3567.82	3998.5	4239.46	4743.66	5233.06	5704.33	6112.65	6557.1	6965.12
SULBAR	3440.11	3633.48	3787.27	3993.14	4251.36	4509.17	4861.35	5111.31	5563.92	5975.08
MALUKU	2359.48	2501.18	2651.11	2812.04	3035.65	3230.05	3445.5	3656.3	3898.96	4112.59
MALUT	5548.9	5934.32	6399.53	7286.98	9361.36	11890.14	13780.12	15061.52	15888.69	16858.34
PAPBAR	18402.2	19200.3	18931.84	23138.44	22400.09	21207.82	21436.17	24616.65	25940.88	27017.84
PAPUA	1789144	1890607	1999047	2094358	2222987	2364159	2512723	2661071	2758145	2964195

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Lampiran 9 Tingkat Inflasi Tiap Provinsi di Indonesia

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	9.98	9.41	1.92	3.72	5.86	3.34	0.22	7.31	8.09	0.76
SUMUT	6.11	6.6	10.72	2.61	8	0.67	3.86	10.18	8.17	3.24
SUMBAR	2.96	1.53	0.21	-0.65	2	0.48	0.94	0.7	2.66	1.79
RIAU	6.32	7.53	9.02	1.94	7	5.09	3.35	8.83	8.65	2.65
JAMBI	2.01	1.84	-0.1	-0.31	1.83	0.66	0.62	0.4	2.61	1.43
SUMSEL	8.44	8.21	11.15	1.85	6.02	3.78	2.72	7.04	8.38	3.1
BENGKULU	6.52	5	11.94	6.71	9.08	3.96	4.61	9.94	10.85	3.25
LAMPUNG	6.03	6.58	14.82	4.14	9.95	4.24	4.3	7.56	8.36	4.56
BBELITUNG	6.42	2.64	18.4	2.17	9.01	5	6.57	8.71	9.06	3.27
KEP. RIAU	4.58	4.85	6.41	-0.02	0.21	0.06	0.84	0.64	2.74	0.92
JAKARTA	6.03	6.04	11.11	1.82	6.21	3.97	4.52	8	8.95	3.3
JABAR	1.4	1.77	11.11	2.02	6.62	3.1	3.86	9.15	7.6	2.73
JATENG	7.11	8.26	3.17	6.78	6.88	2.68	4.24	7.99	8.22	2.73
DIY	10.4	7.99	9.88	2.93	7.38	3.88	4.31	7.32	6.59	3.09
JATIM	6.76	6.48	9.66	3.62	6.96	4.09	4.5	7.59	7.77	3.08
BANTEN	7.67	6.31	12.63	2.68	6.1	3.45	4.37	9.65	10.2	4.29
BALI	4.3	5.91	9.62	4.37	8.1	3.75	4.71	7.35	8.03	1.73
NTB	4.17	8.77	13.29	3.34	10.08	6.55	3.99	9.51	7.23	3.41
NTT	9.72	8.44	10.9	6.49	9.97	4.32	5.1	8.84	7.76	4.92
KALBAR	6.32	8.56	11.19	4.91	7.81	5.8	5.41	7.81	9.52	10.64
KALTENG	8.33	7.77	10.72	2.7	9.51	4.55	5.85	6.75	7.07	4.74
KALSEL	11.03	7.78	11.62	3.86	9.06	3.98	5.96	6.98	7.16	5.14
KALTIM	6.04	8.3	13.06	7.28	6.96	6.35	5.6	9.65	7.44	4.89
SULUT	1.44	1.69	0.46	0.38	1.5	0.94	0.1	2.69	3.83	1.74
SULTENG	8.69	8.13	10.4	5.73	6.4	4.47	5.87	7.57	8.85	4.17
SULSEL	7.21	5.71	11.79	3.24	6.82	2.87	4.57	6.24	8.51	5.18
SUTRA	10.68	7.53	15.28	6.41	4.04	5.09	5.25	5.92	3.27	0.51
GORONTALO	7.54	7.02	9.2	4.35	7.43	4.08	5.31	5.84	6.14	4.3
SULBAR	3.01	3.01	11.66	1.78	5.12	4.91	3.26	5.77	7.66	5.07
MALUKU	4.79	5.85	9.34	6.48	8.78	2.85	6.73	8.81	6.81	5.82
MALUT	5.12	10.43	11.25	3.88	5.31	8.72	6.38	9.78	9.34	0.37
PAPBAR	9.43	12.06	20.51	2.61	4.48	2.36	4.99	0.91	1.89	2.76
PAPUA	9.52	10.35	12.55	1.92	4.48	3.4	4.52	8.27	7.98	2.79

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

**Lampiran 10 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tiap Provinsi di
Indonesia**

PROVINSI	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ACEH	60.27	65.82	61.95	66.72	67.09	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45
SUMUT	65.52	65.87	66.27	66.74	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51
SUMBAR	65.31	65.83	66.5	66.94	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98
RIAU	66.62	67.39	67.78	68.24	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84
JAMBI	64.09	64.24	64.71	65.13	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	67.46
SUMSEL	62.8	63.07	63.64	64.14	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46
BENGKULU	63.88	64.1	64.65	65.02	65.35	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59
LAMPUNG	61.9	62.24	62.71	63.27	63.71	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95
BBELITUNG	65.5	84.9	85.41	65.74	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05
KEP. RIAU	68.99	70	69.9	70.68	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75
JAKARTA	75.06	75.31	75.75	76.07	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99
JABAR	64.34	64.7	65.08	65.55	66.15	66.76	67.32	68.25	68.8	69.5
JATENG	64.04	64.65	65	65.72	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49
DIY	73.31	73.73	74.48	74.83	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59
JATIM	63.13	63.68	64.5	64.84	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95
BANTEN	66.22	66.4	66.8	67.13	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27
BALI	67.95	68.4	68.83	69.36	70.1	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27
NTB	59.13	59.76	60.14	60.65	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19
NTT	57.07	57.53	58.23	58.62	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67
KALBAR	59.17	60.51	61.1	61.97	61.97	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59
KALTENG	64.86	64.94	65.28	65.71	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53
KALSEL	63.17	63.41	64.08	64.62	65.2	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38
KALTIM	69.14	69.62	70.32	70.88	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17
SULUT	66.3	66.57	67	67.46	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39
SULTENG	61.25	61.69	62.3	62.9	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76
SULSEL	63.41	64.15	64.7	65.37	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15
SUTRA	63.91	64.4	65.08	65.53	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75
GORONTALO	60.62	61.35	61.76	62.21	62.65	63.48	64.16	64.7	65.17	65.86
SULBAR	57.52	58.6	58.8	59.34	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96
MALUKU	62.71	62.95	63.33	63.85	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05
MALUT	61.4	61.69	62.01	62.42	62.79	63.19	63.39	64.78	65.18	65.91
PAPBAR	56.95	57.99	58.56	59.1	59.6	59.9	60.3	60.91	61.28	61.73
PAPUA	52.61	53.16	53.66	54.1	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia